# UPAYA TIONGKOK DALAM MEREDAKAN KETEGANGAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN: PENDEKATAN TIONGKOK MENGGUNAKAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* (BRI) DI FILIPINA (2013-2018)

**SKRIPSI**


**Oleh:**

**MUHAMMAD ATHOILLAH**

**14323093**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**2018**

# UPAYA TIONGKOK DALAM MEREDAKAN KETEGANGAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN: PENDEKATAN TIONGKOK MENGGUNAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) DI FILIPINA (2013-2018)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memperoleh Memenuhi Persyaratan Meperoleh Gelar
Sarjana Hubungan Internasional
Pada Program Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

**Oleh :**

**MUHAMMAD ATHOILLAH**

**14323093**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

# HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN**
**UPAYA TIONGKOK DALAM MEREDAKAN KETEGANGAN KONFLIK**

**LAUT TIONGKOK SELATAN: PENDEKATAN TIONGKOK**

**MENGGUNAKAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* (BRI) DI FILIPINA**

**(2013-2018)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional
Pada Tanggal
18 Desember 2018

Mengesahkan
Progam Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Progam Studi

Irawan Jati, S.IP ,M.Hum ,M.S.S

| Dewan Penguji | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Karina Utami Dewi S.IP, M.A | |
| 2. Hangga Fatana, S.I.P., B.Int.St., M.A. | |
| 3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A. | |

ii

**PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Athoillah |
| No. Mahasiswa | : 14323093 |
| Program Study | : Hubungan Internasional |
| Judul Skripsi | : Upaya Tiongkok Dalam Meredakan Ketegangan Konflik Laut Tiongkok Selatan: Pendekatan Tiongkok Menggunakan *Belt And Road Initiative* (BRI) Di Filipina (2013-2018) |

Melalui surat ini saya menyatakan:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Yang

METERAI TEMPEL

5B2DFAEF960205822

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Athoillah

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
..... ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK ..... iii
DAFTAR ISI ..... iv
DAFTAR SINGKATAN ..... vi
ABSTRACT ..... vii
BAB I ..... 1
PENDAHULUAN ..... 1
1.1 LATAR BELAKANG ..... 1
1.2 RUMUSAN MASALAH ..... 5
1.3 TUJUAN PENELITIAN ..... 5
1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN ..... 6
1.5 CAKUPAN PENELITIAN ..... 7
1.6 TINJAUAN PUSTAKA ..... 8
1.7 LANDASAN TEORI ..... 12
1.8 METODE PENELITIAN ..... 15
1.8.1 Jenis Penelitian ..... 15
1.8.2 Subjek Penelitian ..... 15
1.8.3 Alat Pengumpul Data ..... 15
1.8.4 Proses Penelitian ..... 16
1.8.5 Sistematika Penulisan ..... 16
BAB II ..... 18
ANALISIS PENDEKATAN TIONGKOK KE FILIPINA SEBAGAI *LINKER* ..... 18
2.1 TIONGKOK SEBAGAI *LINKER* ..... 19
2.2 TUJUAN YANG INGIN DICAPAI TIONGKOK ..... 20
2.2.1 Tujuan Keamanan Tiongkok ..... 22
2.2.2 Tujuan Ekonomi ..... 24
2.3 TAWARAN *LINKER* MELALUI PENGAJUAN BRI *(BELT AND ROAD INITIATIVE)* ..... 27
2.4 ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PIHAK TIONGKOK ..... 32

BAB III ..... 36
ANALISIS *LINKEE* FILIPINA MENERIMA TAWARAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* ..... 36
3.1 FILIPINA SEBAGAI *LINKEE* ..... 36
3.2 TUJUAN YANG INGIN DICAPAI FILIPINA ..... 37
3.2.1 Tujuan Keamanan (klaim Kawasan Laut Tiongkok Selatan) ..... 38
3.2.2 Tujuan Ekonomi (Realisasi *Belt and Road Initiative*) ..... 40
3.3 PENERIMAAN FILIPINA TERHADAP TAWARAN BRI ..... 41
3.3.1 Perubahan Kepentingan Filipina di Laut Tiongkok Selatan ..... 41
3.3.2 Revitalisasi Hubungan Ekonomi ..... 44
3.4 ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PIHAK FILIPINA ..... 47
4.1 KESIMPULAN ..... 53
4.2 REKOMENDASI ..... 58
DAFTAR PUSTAKA ..... ix

## DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---|---|
| AIIB | : Asian Infrastructure Investment Bank |
| AS | : Amerika Serikat |
| ASEAN | : Association of Southeast Asian Nations |
| BMC | : Bilateral Consultative Mechanism |
| BRI | : Belt and Road Initiative |
| CNOOC | : China National Offshore Oil Corporation |
| DOC | : Declaration Of the Conduct |
| FDI | : Philippines Foreign Direct Investment |
| GDP | : Gross domestic product |
| ICJ | : International Court of Justice |
| IMF | : International Monetary Fund |
| MSR | : Maritime Silk Road |
| PDB | : Produk Domestik Bruto |
| UNCLOS | : United Nations Convention on the Law of the Sea |
| WTO | : World Trade Organization |
| ZEE | : Zona Ekonomi Eksklusif |

# ABSTRACT

**Upaya Tiongkok Dalam Meredakan Ketegangan Konflik Laut Tiongkok Selatan: Pendekatan Tiongkok Menggunakan Belt And Road Initiative (Bri) Di Filipina (2013-2018)**



**Muhammad Athoillah (14323093@students.uii.ac.id)**



Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang berada dikelilingi beberapa negara. Wilayah Paracel dan Spartly merupakan daerah yang berapa di Laut Tiongkok Selatan yang mana terdapat masing-masing klaim dari pihak Tiongkok dan Filipina. Kedua negara ini saling memberikan klaim atas wilayah teritorialnya masing-masing. Pada tahun 2003 disepakati *Declarationg Of the Conduct* (DOC) sebagai aturan yang membatasi pergerakan klaim yang saling tumpang tindih. Namun pada tahun 2007-2010, Tiongkok melakukan pembangunan pulau dan pergerakan aktifnya di wilayah yang ditentukan untuk tidak membuat kegiatan yang menimbulkan ketegangan. Pada tahun 2013, Tiongkok memberikan tawaran inisiasi kerja sama yang saling menguntungkan. Tiongkok bertujuan meredakan ketegangan atas konflik Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan Filipina menggunakan inisiasi kerja sama proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang berisikan pelebaran perekonomian dengan cara pemberian investasi sekala besar. Dampak yang didapatkan Tiongkok dari tawaran kerjasama tersebut ialah Tiongkok mampu meredakan permasalahan dengan Filipina. Selain itukegiatan keamanan di wilayah Laut Tiongkok Selatan Tiongkok mampu mengambil alih dari Filipina. Filipina sebagai negara yang menerima tawaran kerja sama BRI ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh Filipina. Sejalan dengan tawaran yang Tiongkok berikan, di sisi lain Filipina juga memiliki rancangan pembangunan infrastruktur guna membangun perekonomian Filipina untuk lebih maju.



*Kata Kunci: Tiongkok, Filipina, Keamanan, ekonomi, Pembangunan, Investasi*

## ABSTRACT

**Upaya Tiongkok Dalam Meredakan Ketegangan Konflik Laut Tiongkok Selatan: Pendekatan Tiongkok Menggunakan Belt And Road Initiative (Bri) Di Filipina (2013-2018)**



**Muhammad Athoillah (14323093@students.uii.ac.id)**



The South China Sea is an area surrounded by several countries. The Paracel and Spartly regions in the South China Sea where there are individual claims from China and the Philippines. These two countries give each other claims for their respective territories. In 2003 a Declaration of the Conduct (DOC) was agreed as a rule that limits the movement of overlapping claims. However, in 2007-2010, China carried out island development and its active movements in the designated area not to create activities that caused tension. In 2013, China offered a mutually beneficial partnership initiative. China aims to ease tensions over the South China Sea conflict between China and the Philippines using the initiation of cooperation in the Belt and Road Initiative (BRI) project which contains the widening of the economy by providing large-scale investments. The impact that China got from the offer of cooperation was that China was able to ease the problems with the Philippines. Besides that, security activities in the South China Sea region of China were able to take over from the Philippines. The Philippines as a country that accepts the offer of BRI cooperation also has the objectives to be achieved by the Philippines. In line with the offer that China has given, on the other hand the Philippines also has an infrastructure development plan to build the Philippine economy to be more advanced.



*Keywords: China, Philippines, Security, economy, Development, Investment*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Laut Tiongkok selatan adalah sebuah wilayah yang diperebutkan oleh Tiongkok dan Filipina sejak tahun 1974. Pada masa pemerintahan Chiang Kai Sek, Laut Tiongkok Selatan diklaim dengan dasar sejarah Tiongkok yang lebih dahulu ada dan lebih lama menaruh klaimnya, sampai sekarang konflik perbatasan dan wilayah ini masih dalam perjuangan Tiongkok untuk berhasil akan klaim wilayah tersebut (Roza, 2013, p. 8). Laut Tiongkok Selatan merupakan daerah yang berada di antara dua pulau besar yakni Spratly dan Paracels serta, bentangan laut dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan yang dalam sejarahnya dikuasai secara bergantian oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat. Pergolakan klaim secara konfrontatif dari beberapa negara mendorong Tiongkok mengemukakan klaimnya kembali pada tahun 2012 (Allen, 2016).

> *"We are strongly committed to safeguarding the country's sovereignty and security, and defending our territorial integrity." Presiden Tiongkok Xi Jinping, 21 September 2012 (council on foreign relations)* (Kaye, 2016) .

Kutipan di atas yang bermaksud untuk klaim aktif terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan yang dideklarasikan oleh presiden Tiongkok dengan melakukan beberapa tindakan nyata seperti reklamasi pulau dan penerjunan beberapa pasukan

militer. Tiongkok merasa hal ini perlu dilakukan karena adanya beberapa faktor eksternal yang melibatkan Amerika Serikat (AS) yang membawa isu keamanan. Dengan demikian, pendekatan Tiongkok melalui beberapa pembangunan di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan klaimnya tidak dipandang sebagai hal yang salah oleh Tiongkok (Daiss, 2016).

Pada tahun 1992 ASEAN menandatangani deklarasi terkait perselisihan Laut Tiongkok Selatan di Manila dikarenakan kepedulian ASEAN. Hal yang dikemukakan oleh para menteri luar negeri ASEAN yakni masalah Laut Tiongkok Selatan adalah masalah yang sensitif terkait kedaulatan dan yurisdiksi beberapa pihak yang terkait secara langsung, serta setiap perkembangan yang merugikan di Laut Tiongkok Selatan secara langsung telah mempengaruhi perdamaian dan stabilitas kawasan. Filipina, negara non-ASEAN pada saat itu, mendukung Deklarasi Manila. Tiongkok bagaimana pun, menegaskan kembali posisinya tentang penolakannya untuk menerima diskusi multilateral mengenai isu tersebut dan pandangannya bahwa perselisihan Paracels dan Spratly tidak menyangkut ASEAN (Ishak, 2017, p. 2).

Namun demikian, menteri luar negeri Tiongkok Qian Qichen mengatakan bahwa Tiongkok menganut deklarasi prinsip-prinsip yang Tiongkok ikuti sehingga mendorong Tiongkok untuk berkomitmen menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan menghindari perilaku mengancam atau penggunaan kekerasan. Salah satu upaya Tiongkok dalam meredakan ketegangan dan kekhawatiran ASEAN terhadap Tiongkok yakni adanya kunjungan pemimpin Tiongkok Hu Jintao mengunjungi Indonesia, Brunei, dan Filipina untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama

Pada tahun 2005. Terlebih lagi dengan rancangan Tiongkok melaksanakan proyek BRI (*Belt and Road Initiative)* yang mana melibatkan banyak negara termasuk negara Indochina (Filipina) dengan sangat intensif. Selain kedekatan Tiongkok secara langsung dengan Filipina, BRI diyakini mampu membantu meredakan ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan yang berlangsung sampai sekarang. Oleh karena itu, hal ini juga membantu meredakan persepsi ASEAN terhadap Tiongkok sebagai ancaman (Severino, 2010, p. 42).

Tiongkok tentu saja memiliki kepentingan dengan menjalin hubungan kerja sama ekonomi dengan tetangganya ASEAN, apalagi dengan dalih menjalin teman kerja. Tiongkok meningkatkan kekuatannya dengan cara memperluas kepentingannya dan mengerahkan pengaruhnya ke ASEAN yang mana bisa mempengaruhi ketegangan atas gugatan ASEAN ke Tiongkok yang lebih memilih jalur pembangunan yang damai. Kekhawatiran terkait kemungkinan ambisi hegemoni Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan semakin tercium oleh ASEAN yang mana menyebabkan tegangnya hubungan di antara keduanya. Oleh karena itu Tiongkok tidak berhenti untuk melakukan pendekatan bilateral secara intensif dengan beberapa negara anggota ASEAN salah satunya Filipina (Yunling, 2012, hal. 160).

Pendekatan Tiongkok selain dengan melakukan kerja sama di bidang ekonomi, juga melakukan perjanjian di bidang keamanan yakni dengan melakukan *Declaration Of the Conduct* (DOC) pada tahun 2003 terkait dengan Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kemakmuran, yang dirumuskan berfungsi sebagai rencana induk untuk memperdalam dan memperluas hubungan dan kerja sama ASEAN-Tiongkok.

ASEAN dan Tiongkok menyatakan untuk melakukan tindakan bersama dan melaksanakan DOC secara efektif (Thuy, 2011, hal. 5).

Pada pertemuan pertama ASEAN-Tiongkok di Manila pada tanggal 4-5 Agustus 2005, ASEAN mempresentasikan draff Pedoman untuk pelaksanaan DOC untuk diskusi. Menurut ASEAN praktek dalam menangani Mitra dialog, ASEAN ingin berurusan dengan Tiongkok sebagai kelompok dan berkonsultasi di antara mereka sendiri yakni hubungan bilateral ASEAN dan Tiongkok sebelum bertemu dengan Tiongkok pada pertemuan yang resmi (Group, 2004, hal. 17). Namun, Tiongkok lebih memilih berurusan langsung dengan pihak terkait yakni pertemuan bilateral secara langsung dengan negara terkait (Indochina) bukan melalui institusi regional yakni ASEAN (Group, 2004, hal. 17).

Sebagai negara paling kuat, pendekatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menentukan sifat perselisihan. Sejak 2007-2008, karena Beijing mengoreksi kebijakannya terhadap masalah Laut Tiongkok Selatan dengan pendekatan yang lebih tegas, situasinya menjadi tegang lagi. Pada bulan Desember 2007, Tiongkok mendirikan kota Sansha untuk administrasi pulau Paracel dan Spratly (dan terumbu karang Macclesfield Bank). Pada bulan Januari 2010, Tiongkok memutuskan untuk membentuk badan-badan pemerintahan lokal di Kepulauan Paracel dan mengembangkan industri pariwisata pulau itu dan tindakan itu memancing kecaman dari Filipina (China-Embassy, 2010).

Pada Juni 2010, ASEAN mengecam rencana Tiongkok itu sebagai ketidakkonsistenan Tiongkok terhadap kedaulatannya dan bertentangan dengan prinsip

DOC. Ia mengutip ketentuan lima dari DOC: “Para pihak berusaha untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas termasuk, antara lain, menahan diri dari tindakan apa pun yang menghuni pulau-pulau yang tidak berpenghuni saat ini, terumbu karang, beting, cays, dan fitur lainnya, dan untuk menangani perbedaan mereka secara konstruktif.” (fmprc.gov, 2014).

Kedua pembahasan tersebut, isu yang terjadi antara ASEAN dengan Tiongkok dengan melakukan hubungan kerja sama dan perjanjian ekonomi yang menghubungkan isu terkait keamanan dan kawasan. Pendekatan Tiongkok mempunyai tujuan untuk meredakan ketegangan serta klaim secara langsung dari Filipina terhadap Laut Tiongkok Selatan. Wujud dari pendekatan Tiongkok terbukti dengan pelaksanaan proyek BRI di Filipina dengan kepentingan Tiongkok untuk menumbuhkan anggapan Filipina terhadap Tiongkok sebagai rekan kerja (Lim, 2017).

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Upaya Tiongkok dalam Meredakan Ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap Filipina menggunakan Belt and Road Initiative (BRI) tahun 2013-2018?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Tiongkok dalam melakukan pendekatan kepada ASEAN khususnya negara Filipina untuk meredakan Ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan.

2. Mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh Tiongkok ke negara Filipina sebagai pendekatan diplomasi yang akan berdampak kepada dua hal, yakni perekonomian dan keamanan kawasan menggunakan pendekatan *Issue Linkage.*
3. Meninjau dampak pendekatan Tiongkok ke negara Filipina terhadap perekonomian, keamanan dan kedaulatan ASEAN.
4. Sejauh mana pendekatan Tiongkok efektif dalam menggunakan inisiatif BRI.
5. Mengkritisi sistem konsensus ASEAN dalam prosedur pembuatan keputusan.

## 1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Berbicara tentang Tiongkok pasti tidak akan lepas dengan kekuatan perekenomian yang bagus oleh Tiongkok, terlebih lagi terkait isu Laut Tiongkok Selatan yang tidak lepas dari Upaya Tiongkok dalam salah satu pendekatan untuk klaim laut Tiongkok selatan. Salah satu Upayanya dengan membuat hubungan kerja sama perekonomian antara Tiongkok dengan negara Filipina. Secara tidak langsung Tiongkok mempunyai tujuan lain untuk mengklaim Laut Tiongkok Selatan dengan cara menjadikan negara Indochina secara aktif sebagai rekan kerja sama sehingga menumbuhkan persepsi bagi ASEAN dan Indochina bahwa Tiongkok adalah sebuah rekan kerja dan bukan sebuah ancaman. Kedekatan kerja sama ini dibuktikan dengan proyek Tiongkok yakni BRI (Swaine, 2016, p. 4)

Oleh karena itu posisi penulis ingin membuktikan bahwa Upaya Tiongkok efektif dalam menjalin hubungan kerja sama serta meningkatkan kepercayaan yang lebih kepada negara Filipina. Tiongkok memberikan tekanan yang berdampak langsung dari

konflik ini sehingga dapat memberikan suara terhadap beberapa kegiatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang dianggap sebuah ketidakkonsistenan oleh ASEAN karena telah membangun beberapa pangkalan militer dan pulau yang mana dilarang dalam isi Declaration Of the Conduct (DOC) pada tahun 2003 untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat konfrontasi (Thayer C. A., 2012, p. 2). Kuatnya pendekatan Tiongkok ke negara Filipina yakin dan lebih condong kepada Tiongkok daripada konsensus ASEAN. Selain itu penulis ingin mendalami bagaimana dampak yang akan terjadi ketika negara Filipina tidak menyetujui keputusan ASEAN untuk menuntut keadilan terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tiongkok (Thayer C. A., 2012, p. 2).

## 1.5 CAKUPAN PENELITIAN

Skripsi ini fokus pada Upaya Tiongkok dalam melakukan pendekatan hubungan kerja sama bilateral dengan negara Filipina. Kerja sama ini yang bertujuan untuk meredakan ketegangan klaimnya atas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Upaya yang dilakukan Tiongkok yakni dengan melakukan kerja sama bilateral dengan kerja sama antara Tiongkok dengan Filipina yang mana masuk dalam salah satu program inisiatif BRI oleh Tiongkok. Penelitian ini meninjau aktivitas Tiongkok yang dilakukan di Laut Tiongkok Selatan dari tahun 2013-2018 sebagai bentuk Upaya meredakan ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan. Karena pertama kali *Belt and Road Initiative* (BRI) diperkenalkan pada tahun 2013. Sehinggagagasan ini menjadi salah satu bentuk upaya

bagi Tiongkok untuk meredakan ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan meskipun pendekatan secara langsung dan realisasinya pada tahun 2014.

Agar fokus penelitian ini dapat lebih dalam dan spesifik, maka negara yang akan dibahas dibatasi hanya Filipina saja. Karena pendekatan Tiongkok ke negara ini memiliki status pendekatan yang intensif, selain itu karena adanya ajuan klaim yang paling besar dan aktif, serta permasalahan pembangunan pulau oleh Tiongkok hanya berada di wilayah teritorial negara Filipina tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat komprehensif jika fokus penelitian hanya dibatasi oleh pendekatan Tiongkok ke Filipina saja. Demikian, penulis hanya melakukan batasan penelitian Tiongkok dengan negara Filipina yang akan berdampak kepada kedaulatan sistem konsensus ASEAN.

## 1.6 TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai pendekatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan serta dengan melakukan hubungan kerja sama. Chi-kin Lo, dalam bukunya yang berjudul *China's Policy Towards Territorial Disputes*, menjelaskan Tiongkok memiliki kepentingan geopolitik di wilayah Spratly Islands berupa eksplorasi minyak. pada kasus ini mendukung peran utama yang dimainkan oleh Tiongklok atas kepentingan geopolitik dalam membentuk perilaku Tiongkok yang didasari kepentingan Uni Soviet. Geopolitik kepentingan telah muncul di balik semua keputusan besar Tiongkok atas perselisihan klaim antara laut Tiongkok Selatan. Namun, tulisan Lo hanya menjelaskan tentang ketegangan

perselisihan di kawasan ini pada tahun 80-an dan hanya menyinggug tentang isu keamanan (Lo, 2005).

Buku yang berjudul *Chinese Thinking on the South China Sea and the Future of Regional Security* membahas tentang kepentingan yang dapat menguntungkan Tiongkok walaupun harus melewati batas teritorial wilayah lain, akan tetapi bagaimanapun Tiongkok harus memiliki pemikiran untuk Masa depan kebijakan Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan yang akan tergantung pada kompetisi intelektual dan kebijakan antara pragmatis *stakeholder* yang terkait. Tulisan ini lebih banyak menyinggung tentang interaksi dua kekuatan besar yakni antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang berada di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang akan berdampak pada perubahan keamanan regional dan kerja sama internasional dan dimungkinkan terjadinya konfrontasi dan konflik yang menuju pada konsekuensi yang tidak diinginkan oleh sifat politik internasional di Laut Tiongkok Selatan (Zhang, 2017, p. 449).

*Wu Shicun,* dalam bukunya yang berjudul *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea,* menjelaskan situasi saat ini di Laut Tiongkok Selatan, ketegangan telah meningkat, terutama antara Tiongkok dan Filipina. Untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di kawasan, buku ini lebih menjelaskan kebutuhan mendesak untuk suatu mekanisme untuk manajemen penyelesaian konflik dan sengketa (Shicun, 2013, p. 15).

Tulisan yang menjelaskan tentang permasalahan Laut Tiongkok Selatan di salah satu buku yang ditulis oleh Walter Lohman, berjudul *A Critical Assessment of ASEAN's Diplomacy Regarding the South China Sea* menjelaskan ASEAN yang telah berhasil dalam penanganan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kepentingan negara-negara non-pemohon selain negara Vietnam dan Filipina kebanyakan disajikan atas dasar kepentingan persatuan dan kedaulatan ASEAN, apa pun resolusi sengketa teritorial dengan Tiongkok. Pendekatan ASEAN saat ini, tidak melayani kepentingan materi semua anggotanya  terutama Filipina. di sisi lain, ASEAN gagal dalam usaha untuk menarik Tiongkok untuk mendamaikan berbeda kepentingan para negara anggotanya. Pendekatan ASEAN ke Tiongkok (yang bertujuan mengurangi kegiatan mengeksploitasi daerah teritorial yang masuk dalam peta ASEAN dan tujuan jangka panjang) dilakukan secara konsensus, sehingga menyediakan cukup waktu bagi Tiongkok untuk memenuhi tujuan klaim teritorial sebagai perluasan perekonomiannya (Lohman, 2015, hal. 78).

Pelaksanaan proyek dalam kerangka DOC yang dijelaskan pada tulisan *The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* oleh "Nguyen Hong Thao" pada buku *Security and International Politics in the South China Sea* yang disusun oleh "Sam Bateman and Ralf Emmers" memaparkan bahwa DOC akan menciptakan kontak yang lebih sering dan intensif antara ASEAN "negara Filipina" dengan Tiongkok. Tulisan ini lebih mengacu kepada perspektif ASEAN dengan memaparkan implementasi dari DOC yang tidak mulus dikarenakan Tiongkok tidak

konsisten dari pelaksanaan proyek DOC berdasarkan pada persetujuan pedoman ASEAN-Tiongkok dan itikad baik dari semua penuntut. Negara-negara anggota ASEAN harus menyatukan kedudukan mereka pada pelaksanaan DOC, dan harus aktif bekerja sama dengan Tiongkok untuk bergerak maju dengan pelaksanaan DOC (Thao, 2009, p. 210).

Salah satu tulisan yang berjudul *The China-Philippine Bilateral Consultative Mechanism on the South China Sea: Prospects and Challenges* yang ditulis oleh *Lye Liang Fook* memaparkan bahwa Tiongkok lebih memilih jalan bilateral dibandingkan dengan bergabung pada perjanjian kerja sama yang menjembatani kasus Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, buku ini lebih fokus pendekatan Tiongkok ke Filipina ditunjukkan oleh hubungan Tiongkok dengan Filipina membaik karena pelaksanaan *Billateral Consulative Mechanism* (BMC) di Laut Tiongkok Selatan. Isi dari tulisan ini menjelaskan kepada kolaborasi tingkat lanjut di bidang kepentingan bersama yakni pada isu Laut Tiongkok Selatan, yang mana Tiongkok gencar mempromosikan bahwa BMC adalah sebuah jalan alternatif yang tepat untuk menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan secara bilateral dengan tujuan eksistensi Tiongkok dalam perselisihan dengan negara-negara penuntut ASEAN. Namun tulisan ini masih sebatas bagaimana hubungan Tiongkok dengan Filipina di bidang kerja sama BMC bukan spesifik menerangkan masalah kerja sama perekonomian maupun menyinggung permasalahan di perjanjian DOC (Fook, 2018, hal. 4).

Seperti yang telah dibahas di atas bahwa cukup banyak penelitian yang membahas mengenai isu sengketa Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN dan negara anggota ASEAN dengan Tiongkok. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat dua isu yang relevan yakni isu keamanan dan isu ekonomi untuk dihubungkan karena mempunyai ikatan dan kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Terlebih lagi, hubungan isu keamanan dan ekonomi ini terfokus pada pendekatan Tiongkok ke Filipina, dikarenakan negara ini memiliki proses klaim yang paling banyak dibandingkan negara lain. Serta perbedaan terkait beberapa penulisan di atas, tulisan ini lebih fokus kepada upaya Tiongkok dengan melakukan pendekatan terhadap Filipina dikarenakan Tiongkok memandang negara ini sebagai ancaman keamanan bagi Tiongkok.

## 1.7 LANDASAN TEORI

*Issue Linkage*

Landasan teori atau konsep yang digunakan untuk skripsi ini adalah teori yang dijabarkan oleh Haas mendefinisikan hubungan sebagai tawar-menawar yang melibatkan lebih dari satu masalah yang dikaitkan dengan masalah lainnya yang ada kaitannya atau saling berhubungan satu sama lain untuk penyelesaian bersama secara eksplisit, keduanya dibahas dalam suatu perjanjian yang mana dikenal sebagai memperluas “ruang lingkup” dari sebuah perjanjian (Haas E. B., 1990, p. 272).

*Issue Linkage* memiliki negosiasi sebagai proses penerapan teori ini. Negosiasi *Lingkage* akan berhasil ketika kelembagaan sukses dibawa ke perundingan secara

resmi di tingkat internasional melalui beberapa perjanjian kerja sama yang dilaksanakan. Hal ini tentu saja selaras dengan kepentingan dari aktor yang terlibat dalam keadaan perubahan konsensual. Negosiasi khusus permasalahan, cenderung mendukung koalisi negara-negara yang telah lama tertarik dengan masalah ini. Selain itu, siapa yang mendominasi sumber daya pada permasalahan tersebut mampu membuat Keputusan untuk menarik pihak lain untuk bekerja sama. di sisi lain, *Issue Linkage* mempunyai aktor yang berperan untuk menghubungkan isu-isu akan dimunculkan jika pihak lain setuju untuk dikaitkan atau diikutsertakan dalam penghubungan isu tersebut (Haas E. B., 1980, p. 382).

Pendekatan *Issue Linkage*, Haas memaparkan bahwa adanya dua actor yakni *Linker* dan *Linkee*. Kebanyakan pihak *Linker* memiliki power lebih besar dibandingkan *Linkee*. Terlebih lagi ketika hasil kesepakatan dalam sebuah perjanjian yakni sangat besar dikendalikan oleh pihak *Linker* dalam mempengaruhi persepsi *Linkee* (Haas, 2011, p. 372).

*Issue Linkage* mempunyai tiga cara persuasi yakni; pertama, suatu negara dapat menghubungkan masalah dengan memasukkan ke dalam agenda negosiasi multilateral yang tidak terhubung dengan koherensi masalah pada dua negara sebelumnya. Haas menyebutnya "hubungan taktis”. Kedua, *Issue linkage* juga dapat dicoba, bagaimanapun, untuk menjaga kohesi koalisi suatu negara. *Issue linkage* juga dapat dicoba, bagaimanapun, untuk menjaga kohesi koalisi suatu negara. Hass menyebut pola perilaku ini sebagai "tautan terfragmentasi". Ketiga, *Issue Linkage* juga dapat

dilanjutkan berdasarkan perkembangan konsensual yang terkait dengan tujuan sosial yang disepakati. Hal ini adalah yang paling menarik bagi pembangunan rezim. Haas menyebutnya "hubungan substantive” (Haas E. B., 1980, p. 389).

Ketiga penjelasan di atas, penulis menggunakan pendekatan Tactical Issue Linkage sebagai alat untuk menganalisis tulisan ini. Pendekatan ini dirasa yang paling tepat untuk menganalisis kasus Tiongkok Selatan. Karena terdapat proses tawar menawar yang melibatkan actor yang sama untuk mendapatkan keuntungan di sisi lain dari isu sebelumnya.

Konsep *Issue Linkage* secara singkat bisa diartikan sebagai Upaya stimulus dari satu pihak yang bergabung dalam sebuah perjanjian dengan melakukan indikasi ketidakkonsistenan dalam beberapa ketentuan dan nilai dari perjanjian tersebut. Upaya ini berlaku ketika satu pihak melakukan tawaran perjanjian lain dengan tujuan untuk menutupi pelanggaran sehingga akan mempermudah jalannya kedua hubungan antar pihak yang terkait. *Issue Linkage* mempunyai negosiasi dalam sebuah proses tawar menawar. Penerapan teori ini dengan isu Laut Tiongkok Selatan adalah sebuah upaya dari Tiongkok atas ketidakkonsistenan yang dilakukan dalam perjanjian DOC dengan melakukan pendekatan ke negara Filipina yang bertujuan untuk mengambil suara dalam sebuah Keputusan konflik Tiongkok dengan ASEAN pada isu Laut Tiongkok Selatan.

Menggunakan teori tersebut penulis ingin melihat bagaimana upaya yang digunakan oleh Tiongkok dengan melakukan kebijakan satu untuk mendapatkan

kebijakan lainnya, yang mana kedua kebijakan tadi saling berhubungan. Kedua aktor yang terlibat di sini adalah dari pihak Tiongkok dengan negara anggota ASEAN yakni Filipina yang melakukan hubungan kerja sama ekonomi dihubungkan dengan hubungan kerja sama keamanan pada kawasan Laut Tiongkok Selatan.

## 1.8 METODE PENELITIAN

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana dalam mengumpulkan data-data yang terkait pada studi kasus dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan penjabarannya bersifat deskriptif (Sugiarto, 2015). Permasalahan pada penelitian ini akan digambarkan melalui pembagian sub topik agar dapat lebih detail dalam menganalisis masalah. Kemudian analisa yang akan dilakukan menggunakan perbandingan data yang telah didapat dari data penelusuran pustaka yang akan membuat menjadi data lebih kredibel.

### 1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Tiongkok yang menerapkan pendekatan *issue linkage* untuk mendominasi konflik Laut Tiongkok Selatan.

### 1.8.3 Alat Pengumpul Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi dan kredibel. Selain itu, sumber data pada penelitian ini juga terdiri dari data primer

dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan secara langsung pada topik penelitian dan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan secara langsung akan tetapi memiliki relevansi dengan topik penelitian (Wibowo, 2011).

### 1.8.4 Proses Penelitian

Teknik analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut menjadi beberapa sub topik. Permasalahan akan digambarkan melalui pembagian sub topik agar dalam menganalisis masalah dapat lebih detail. Dalam sub topik tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai sub topik tersebut. Lalu, dalam setiap tulisan pada sub topik tersebut akan dilakukan analisis melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian ini.

### 1.8.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Setelah bab pertama ini, bab kedua menguraikan ketidakkonsistenan Tiongkok dan bagaimana hubungan Tiongkok dengan Filipina serta menguraikan BRI yang menjadi proyek Tiongkok dalam mengembangkan perluasan wilayah jalur perekonomian.

Bab ketiga menganalisis upaya Tiongkok dalam melakukan pendekatan perekonomian yakni BRI yang akan meredakan ketegangan klaim Laut Tiongkok Selatan. Di sini dibahas upaya Tiongkok melakukan pendekatan ekonomi bertujuan

untuk menutupi penyalahan keamanan. Skripsi ini akan ditutup dengan bab keempat yang berisikan kesimpulan dan referensi dari temuan penelitian.

# BAB II

## ANALISIS PENDEKATAN TIONGKOK KE FILIPINA SEBAGAI *LINKER*

Tiongkok memiliki catatan sejarah sendiri mengenai klaim daerah ini yaitu dengan menggunakan peta yang merinci kepada klaim kedaulatan Tiongkok akan Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok menyatakan bahwa klaim mereka merujuk kepada 2000 tahun lalu, sebagai acuan Tiongkok mengklaim dan menetapkan hukum Nine-Dash Line ketika kawasan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari kawasan Tiongkok. Namun pernyataan itu tidak dibenarkan oleh pihak ASEAN karena sejak abad ke-17, ASEAN telah memiliki dokumen sebagai bukti kepemilikan wilayah Paracel dan Spratly sampai dasawarsa 1940-an (Dzurek, 1996, p. 8).

Begitu pula dengan Filipina yang juga memiliki klaim yang sama atas sebagian wilayah itu. Bukan hanya Filipina dan Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam juga mempunyai klaim atas wilayah Laut Tiongkok Selatan yang masih dalam kawasan *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) mereka yang telah ditetapkan oleh PBB terkait hukum laut pada tahun 1982. Oleh karena itu, Tiongkok menempati posisi penting dalam permasalahan Laut Tiongkok Selatan. (Bautista, 2007, p. 700).

Pembahasan *Issue Linkage* mengenai hal yang paling penting untuk diketahui adalah siapa saja aktor dan perannya masing-masing yang terlibat dalam permasalahan. Aktor dan peranya ini dibagi oleh Haas di *Issue Linkage* menjadi dua bagian yakni dikenal dengan *Linker* dan *Linkee* (Haas, 2011, p. 372). Bab 2 ini akan membahas lebih detailnya posisi Tiongkok dengan membagi menjadi empat subbab yakni

Tiongkok sebagai *Linker*, tujuan yang ingin dicapai oleh Tiongkok, Tawaran *Linker* oleh Tiongkok dan aspek *Win* dan *Loss* yang akan diterjemahkan dengan aspek keuntungan dan kerugian dari Tiongkok.

## 2.1 TIONGKOK SEBAGAI *LINKER*

Tiongkok sebagai negara yang memberikan tawaran isu BRI kepada Filipina yang sekaligus sebagai pihak *linker* dalam kasus *Issue Linkage.* Penawaran tersebut sebagai tindakan hubungan timbal balik antara keduanya atau interdependensi, yang mana hal ini ada pada pelaksanaan proyek BRI Tiongkok ke Filipina (Chelsea Huth, 2017, p. 225). Pendekatan *Issue Linkage*, Haas memaparkan bahwa kebanyakan pihak *Linker* memiliki power lebih besar dibandingkan *Linkee*, terlebih lagi ketika hasil kesepakatan dalam sebuah perjanjian yakni sangat besar dikendalikan oleh pihak *Linker* dalam mempengaruhi persepsi *Linkee* (Haas, 2011, p. 372).

Tiongkok adalah negara yang mempunyai power lebih kuat di bidang keamanan dan ekonomi dibandingkan dengan Filipina. Dalam pelaksanaannya Tiongkok sangat terlihat sebagai pihak yang memberikan akses secara penuh terkait isu yang dihadapkan kepada Filipina. Tawaran ini dibuat Tiongkok untuk meyakinkan Filipina bahwa Tiongkok adalah sebuah Solusi pembangunan perekonomian negaranya dengan cara pengajuan tawaran kerja sama BRI ini (Wong P. , 2017). Di sisi lain Tiongkok seolah mengarahkan persepsi Filipina terhadap kerja sama yang saling menguntungkan bukan hanya keuntungan sepihak.

Pihak *Linker* akan lebih aman jika mampu meyakinkan *Linkee* terhadap tawaran yang disampaikan sebagai interdependensi yang menguntungkan. Walaupun tidak adanya pengetahuan maupun bukti yang nyata dan adanya indikasi tawaran akan ditolak oleh pihak *Linkee*. Namun pihak negosiator atau *Linker* harus memberikan gambaran akan dampak yang jelas dalam pelaksanaan kerja sama antara kedua negara. Hal ini perlu diperdalam oleh *Linker* dikarenakan masing-masing pihak menggunakan psikologi pertahanan yang berbeda, serta tujuan dari kepentingan yang berbeda (Haas, 2011, p. 373). Tiongkok sebagai negara yang lebih maju dari Filipina mampu menjalankan penawaran proyek BRI dengan baik. Sehingga tujuan kepentingan Tiongkok sebagai *Linker* akan tercapai dengan berhasil menguasai perspektif *Linkee* untuk menjalin kerja sama.

## 2.2 TUJUAN YANG INGIN DICAPAI TIONGKOK

Sebagaimana yang telah dibahas di atas, awal mula permasalahan dengan Tiongkok melihat celah aturan yang tertera dari kesepakatan isi dari DOC. Isi tersebut ialah bahwa kedua belah pihak harus menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas (Thayer C. , 2015, p. 3). Termasuk antara lain, menahan diri dari tindakan apapun seperti menghuni pulau-pulau yang saat ini tidak berpenghuni, terumbu karang, beting, gundukan tanah, dan ciri-ciri lain, dan untuk menangani perbedaan mereka secara konstruktif. Namun, isi deklarasi tidak menjelaskan secara detail kegiatan apa

yang dapat dianggap mempersulit atau memperuncing perselisihan (Fravel, 2011, p. 299).

Sebagai negara lebih kuat, pendekatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menentukan sifat perselisihan. Sejak 2007-2008, karena Beijing mengoreksi kebijakannya terhadap masalah Laut Tiongkok Selatan dengan pendekatan yang lebih tegas, situasinya menjadi tegang lagi. Pada bulan Desember 2007, Tiongkok mendirikan kota Sansha untuk administrasi Paracel dan Spratly Islands (dan terumbu karang Macclesfield Bank), yang memicu protes resmi yang kuat dari Filipina serta demonstrasi anti Tiongkok. Pada bulan Januari 2010, Tiongkok memutuskan untuk membentuk badan-badan pemerintahan lokal di Kepulauan Paracel dan mengembangkan industri pariwisata pulau itu dan tindakan itu memancing kecaman sebagai pelanggaran kedaulatan negara Filipina (Truong, 2011).

Kemudian, Tiongkok meloloskan Rencana Besar 2010-2020 untuk Konstruksi dan Pengembangan untuk Pulau Pariwisata Internasional Hainan. Kepulauan Spratly dan Paracel akan dimasukkan ke dalam kompleks laut multi tujuan, rute wisata udara dan laut yang menuju Paracel akan dipromosikan, dan pendaftaran hak untuk menggunakan pulau tak berpenghuni (China Ministry, 2010). Secara garis besar tujuan Tiongkok memiliki dua aspek yang harus dicapai dalam menjalankan perannya sebagai *Linker* kepada Filipina. Dua aspek itu yakni Tiongkok ingin mencapai kepentingan Keamanan dan kepentingan perekonomian yang berdampak kepada kedaulatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

### 2.2.1 Tujuan Keamanan Tiongkok

Tiongkok mengawali klaim atas Laut Tiongkok Selatan sebagai daerah wilayah teritorialnya. Pastinya klaim Tiongkok memicu beberapa klaim balasan atas beberapa negara ASEAN lainnya termasuk Filipina. Namun, penulis menganalisis hal yang perlu diketahui adalah upaya Tiongkok dalam melakukan ketidakkonsistenan dalam peraturan *Declaration on the Conduct* (DOC). Serta beberapa pembangunan masif seperti pembangunan pulau serta melakukan kegiatan militer di luar wilayah teritorialnya pasti memiliki alasan serta tujuan dalam pencapaian keamanan di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok menginginkan keamanan tidak lain adalah untuk pendekatan maritimnya. Negara ini bergantung pada kemakmuran ekonominya pada arus perdagangan energi dan komoditas barang masuk dan barang jadi ke pasar. Namun menurut Nick Bisley bahwa pada abad kesembilan belas Tiongkok direndahkan oleh kekuatan asing yang merobek negara itu dan mempermalukan rakyatnya, setidaknya begitulah mitologi nasionalis Tiongkok. Klaim Partai terhadap legitimasi tergantung pada kemampuannya untuk melindungi kewibawaan negaranya (Bisley, 2016).

Tiongkok harus mengamankan sarana yang digunakan pihak lain untuk mendekati Tiongkok sekalipun itu dalam kondisi perdagangan. Laut Tiongkok Selatan adalah sebagai gerbang depan Tiongkok serta tidak diinginkan gerbang tersebut menjadi rentan tanpa adanya kendali Tiongkok. Pembahasan terkait keamanan, penulis menganalisis adanya intervensi dari pihak luar yakni Amerika Serikat. Tiongkok

menyadari bahwa rival besarnya yakni Amerika Serikat juga ikut andil dalam kontrol Laut Tiongkok Selatan (Morton, 2006, p. 937).

Isu dari campur tangan Amerika Serikat ini meliputi masalah-masalah dan tindakan diplomatik, militer, polisi, dan hukum negara-negara yang terlibat. Permasalahan yang Tiongkok dapatkan dengan AS yakni kompleks dan kontradiktif, yang berarti bahwa setiap keterlibatan AS perlu diberi informasi dan nuansa yang baik oleh Tiongkok (Bouchat, 2014, p. 15). Lara Seligman berpendapat bahwa perluasan operasi militer Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan telah meningkatkan konfrontasi dengan Tiongkok. kebijakan Trump dengan meningkatkan konfrontasinya ke Tiongkok ke tingkat yang lebih serius berupa hampir $ 700 miliar yang disediakan untuk peningkatan operasi militer di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini tentu saja menjadi ancaman keamanan bagi Tiongkok untuk pergerakannya di Laut Tiongkok Selatan (Seligman, 2018).

Tiongkok harus sangat hati-hati dan berani dalam mempertahankan kawasan Laut Tiongkok Selatan karena ancaman yang besar. yang selalu waspada akan pergerakan Tiongkok yakni Amerika Serikat. Melihat sejarahnya sendiri ada dua pakta yakni Tiongkok dan Amerika Serikat yang keduanya telah menjadi rival sejak lama ini, dalam waktu yang singkat dapat menjadi mitra dalam kerja sama ekonomi. Akan tetapi di Laut Tiongkok Selatan, dua kubu ini tidak pernah menyatu dan bahkan yang terlihat adanya perlombaan senjata. Diketahui bahwa pengeluaran pembelanjaan pertahanan meroket yang mana lebih dari 500.000 personil militer di kawasan Asia-Pasifik adalah dari Amerika Serikat (Pham P. , 2017).

Jumlah militer Amerika Serikat yang berada di kawasan ASEAN sendiri sudah sangat banyak. Selain itu, Filipina adalah negara yang memiliki kedekatan yang khusus dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Tiongkok tidak bisa membiarkan hal tersebut berkelanjutan mengingat klaim Tiongkok akan kawasan menyinggung daerah Filipina. Selain itu, Tiongkok akan memperkuat keamanannya dengan dukungan dari Filipina (Murray Hibert, 2015, p. 2). Tiongkok membangun sebuah milisi yang berlayar di laut, penjagaan pantai yang ketat, angkatan laut pribumi terbesar di Asia, dan persenjataan yang cukup besar dari darat untuk mempengaruhi kekuatan di laut sebagai laut semi tertutup. Data di atas, membuktikan bahwa Tiongkok benar-benar serius untuk mendapatkan kawasan regional stabil oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Kurlantzick, 2011).

### 2.2.2 Tujuan Ekonomi

Di bidang ekonomi, Tiongkok dengan aktif berusaha menggantikan prinsip-prinsip liberal Konsensus Washington dengan model pembangunannya sendiri. Penggabungan hiper-kapitalisme dengan kebijakan neomercantilist, "Model Tiongkok" menawarkan pembangunan bersubsidi ke negara-negara berkembang tanpa pamrih. Model ini dimajukan sebagai nilai netral, karena tidak mengharuskan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi atau menjunjung hak asasi manusia (Friend, Thayer, & John, 2018).

Model ini dimajukan sebagai nilai netral, karena tidak mengharuskan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi atau menjunjung hak asasi manusia.

Beijing menerapkan model ini yang memiliki dua tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, Tiongkok akan bekerja dalam rezim perdagangan internasional saat ini, mendukung norma-norma yang telah ditetapkan, dan terus melakukan manuver dalam sistem ini untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, yang bergantung pada pemeliharaan pembangunan ekonomi dan perdagangan (Friend, Thayer, & John, 2018).

Sejak reformasi ekonomi era Deng Xiaoping, Tiongkok telah menerima banyak norma dan aturan tatanan dunia liberal. Serta Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO). Keterlibatan Tiongkok dalam sistem multilateralisme ini adalah kombinasi dari pilihan dan kebutuhan, karena pembangunan ekonomi Tiongkok bergantung pada integrasi global, memperluas pengaruh politiknya, dan mengembangkan soft powernya (Niquet, 2008).

Dalam jangka panjang, Tiongkok menjadi lebih kuat sedangkan Amerika Serikat menurun pengaruhnya. Beijing akan mendorong reformasi yang mempromosikan hiper-kapitalisme dan meminimalkan prinsip demokrasi liberal dalam lembaga-lembaga internasional yang dipimpin Barat. Ketika semakin banyak negara bergabung dengan lembaga-lembaga yang dipimpin Tiongkok, Beijing akan dapat menggunakan kekuatan ekonominya sebagai pengaruh untuk membujuk melalui kombinasi pemerintah Barat dan non-Barat untuk mendukung dan mengadopsi reformasi ini (Friend, Thayer, & John, 2018).

Meskipun pembukaan perdagangan internasional Tiongkok berjalan cepat, Beijing akan terus mengejar kebijakan neomercantilist. Dalam hal ini, keterlibatan

Tiongkok dalam lembaga multilateral sepenuhnya menjadi strategis. Beijing berusaha untuk mematikan persepsi ancaman dan membangun jaringan hubungan ekonomi. Hal ini yang dapat digunakan sebagai pengaruh dan sarana untuk memajukan agenda kebijakan luar negerinya sendiri (Sohn, 2015, p. 188).

Tujuan ekonomi Tiongkok pada Laut Tiongkok Selatan sebenarnya merujuk kepada Tiongkok sebagai pengimpor energi netto. Laut Tiongkok Selatan dianggap kaya akan minyak dan gas. Tiongkok tidak hanya menginginkan manfaat ekonomi yang berasal dari hak kedaulatan atas cadangan hidrokarbon tetapi juga keamanan pasokan yang akan diperlukan oleh Tiongkok. Sama halnya, Laut Tiongkok Selatan terdapat perikanan yang melimpah dan sebagai negara yang mengonsumsi volume protein yang terus tumbuh. Oleh karena itu, menguasai Laut Tiongkok Selatan akan menjadikan potensi yang sangat berharga bagi Tiongkok (Bisley, 2017).

Pada kasus ini, Tiongkok akan terus merangkul multilateralisme dan menjadi lebih terlibat dalam institusi internasional seperti WTO. Namun, sementara mencapai tujuan-tujuan ini, Beijing secara bersamaan mengembangkan institusi ekonomi yang dipimpin Tiongkok seperti *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan *Belt and Road Initiative* (BRI). Sementara itu, elit politik Tiongkok berdebat mendukung dan memperdalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip liberal. Pada akhirnya, Tiongkok melancarkan strategi BRI selain untuk meningkatkan kekuatan ekonomi global Tiongkok, juga meningkatkan hubungan Filipina yang akan terus mendukung Tiongkok (Shepard, 2017).

Tujuan Tiongkok lebih mendalami Laut Tiongkok Selatan pada Beting Scarborough yang diperebutkan, serta adanya pembangunan pulau Sansha oleh Tiongkok. Hal ini menjadi salah satu dari banyak pulau, terumbu, dan beting yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Filipina. Bank Dunia memperkirakan bahwa Laut Tiongkok Selatan memiliki cadangan minyak sedikitnya tujuh miliar barel dan sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam, yang menawarkan peluang ekonomi luar biasa bagi negara-negara pesisir (Kipgen, 2017).

## 2.3 TAWARAN *LINKER* MELALUI PENGAJUAN BRI *(BELT AND ROAD INITIATIVE)*

Dalam mempertahankan posisinya untuk meraih tujuan yang ingin dicapai, Tiongkok melakukan langkah-langkah strategis. Status terakhir dari konflik Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan Filipina sampai tahun 2018 belum menuai hasil yang jelas terkait klaim masing-masing negara. Sampai saat ini Tiongkok telah mendominasi kegiatan di Laut Tiongkok Selatan. Akan tetapi meninjau klaim Filipina ke Tiongkok yang sangat masif dan banyak, sekaligus kekhawatiran Filipina akan menjadi Aliansi Amerika terkait konflik kawasan ini. Oleh karena itu, Tiongkok menawarkan kepada Filipina terkait pembangunan ekonomi Filipina dengan Investasi Pembangunan Infrastruktur dalam pelaksanaan BRI.

Perdana menteri Tiongkok Xi Jinping mengumumkan sepasang inisiatif yakni pengembangan dan perdagangan baru untuk Tiongkok dan kawasan sekitarnya. Pada

akhir 2013, Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim bersama-sama dikenal sebagai BRI (Xinhua, 2016). Kebijakan BRI mewakili ekspansi kapitalisme negara Tiongkok yang ambisius, didorong oleh kelebihan kapasitas produksi industri, serta oleh munculnya minat pertumbuhan perekonomian BRI menunjukkan skenario regional secara umum yang mirip dengan di Eropa antara akhir abad kesembilan belas dan tahun-tahun sebelum Perang Dunia Pertama, ketika negara-negara yang kuat saling berdesakan untuk dominasi industri dan militer. Upaya BRI menggabungkan kekuatan lahan dan kekuatan maritim, memperkuat hegemoni laut Tiongkok yang ada di Asia Timur (Banerjee, 2016, p. 5).

Cita-cita dari konsep ini ialah membangun koridor ekonomi berbasis laut dan lahan yang sangat terintegrasi, kooperatif, dan saling menguntungkan yang menghubungkan pasar Eropa dan Asia. Jalur yang dilintasi proyek BRI adalah dari benua Asia, Afrika dan Eropa. Serta yang menghubungkan lingkaran ekonomi Asia Timur yang hidup di satu ujung dan mengembangkan lingkaran ekonomi Eropa di ujung yang lain dan termasuk negara-negara dengan potensi besar untuk pembangunan ekonomi (Tsui, 2017, p. 42).

Proyek ini lebih fokus pada menyatukan Tiongkok, Asia Tengah, Rusia dan Eropa yang menghubungkan Tiongkok dengan Teluk Persia dan Laut Tengah. Jalur ini melalui Asia Tengah dan Asia Barat; dan menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Samudera Hindia. Maritime Silk Road ini dirancang untuk jalur dari pantai Tiongkok ke Eropa melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudera

Hindia pada satu rute, dan dari pantai Tiongkok melalui Laut Tiongkok Selatan ke Pasifik Selatan (Swaine, 2013, p. 2).

Tiongkok memastikan bahwa daerah BRI mencakup jangkauan lebih dari 60 pasar negara berkembang, dengan jumlah penduduk lebih dari 4 miliar dan agregat ekonomi sekitar $ 21 triliun. penghitungan sekitar 65 persen dan 30 persen dari total global dalam nilai produksi ekonomi berbasis lahan dan maritim masing-masing. meninjau statistik dan luas geografis yang terlibat, BRI adalah sebagai Upaya inisiatif paling signifikan dan berjangkauan luas yang pernah dikemukakan Tiongkok (Jianmin, 2015).

Pada akhir Maret 2015, Beijing mengumumkan bahwa mereka telah membentuk kelompok khusus untuk mengawasi pelaksanaan BRI mengingat inisiasi ini sangat penting. Maksud dari pernyataan tersebut ialah bahwa kelompok elit akan bertanggung jawab atas mengkoordinasi dan membimbing pekerjaan yang terkait dengan inisiatif yang sayangnya tidak merinci dengan jelas anggota-anggotanya. Kelompok elite itu bertempat di bawah Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional, yakni perencana ekonomi terkemuka di Tiongkok (Albert, 2017).

BRI secara jelas dipandang oleh para pejabat dan pengamat Tiongkok sebagai proyek mayor bahkan dalam banyak hal penting usaha kebijakan luar negeri yang juga antusias dalam inisiatif ini. Hal ini tidak diragukan lagi bagi sebagian besar pejabat untuk antusias mendukung dan melancarkan penyelenggaraannya karena inisiatif ini diumumkan langsung oleh Xi Jinping. Hal yang ditekankan oleh Xi Jinping, bahwa sumber-sumber otoritatif Tiongkok menyajikan dengan cara yang paling

menguntungkan bagi seluruh anggota yang terlibat dan tidak adanya keputusan yang bersifat mengancam (Albert, 2017).

Inisiatif ini sebagai upaya bersejarah yang dirancang untuk membangun jaringan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Komunitas kepentingan yang lebih besar di antara tetangga Tiongkok dan di seluruh benua Eurasia dan rute maritim antara Tiongkok dan Eropa. Oleh karena itu, tujuan dari inisiatif ini adalah keuntungan bersama *win-win strategy* atau untung sama untung. Konsep ini jelas dipandang sebagai bagian utama dari keseluruhan tekad Tiongkok dalam gagasan revitalisasi nasional melalui kerja sama dalam dan luar negeri, serta upayanya untuk mengembangkan jenis hubungan antar negara yang baru. Pada tingkat yang lebih konkret, konsep BRI menawarkan manfaat khusus bagi Tiongkok di luar kontribusinya terhadap pengembangan visi Beijing yang lebih luas untuk Eurasia. Beberapa sumber Tiongkok yang otoritatif menekankan tujuan pembangunan domestik Tiongkok serta implikasi strategis eksternal dan tujuan dari konsep BRI (Jiang, 2018).

BRI adalah alat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan ekspor, meningkatkan akses ke sumber daya alam, dan memberikan dukungan untuk kepentingan industri domestik. Dalam hal ini, ada sedikit keraguan bahwa Tiongkok melihat inisiatif BRI sebagai cara menghilangkan kelebihan kapasitas dalam modal barang dan konstruksi Tiongkok tertentu di sektor berorientasi industri. Hal ini dapat menjadi komponen yang semakin penting dari penyesuaian Tiongkok untuk menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Rolland, 2015).

Selain itu juga tidak diragukan lagi untuk mengurangi ketegangan politik dan etnis. Ketegangan baik di dalam wilayah etnis Tiongkok dan di antara negara-negara Asia Tengah dan Timur Tengah. Selain itu, untuk memperkuat hubungan politik dengan autokrasi Asia Tengah yang kaya energi, serta tidak lain adalah untuk memberikan solusi damai atas ketegangan masalah Laut Tiongkok Selatan untuk negara Filipina dan untuk ASEAN sendiri (Rolland, 2015)

Tiongkok menduduki ekonomi terbesar kedua di dunia dengan *Produk Domestik Bruto* (PDB) nominal ($ 11,3 triliun pada tahun 2016, menurut *International Monetary Fund* (IMF) (IMF, 2018). Tiongkok merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat sejak awal abad ke-21, dengan pertumbuhan rata-rata 10%. Negara ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, dan modelnya telah secara bertahap berubah dari model yang dipimpin ekspor ke model konsumen domestik. Fakta-fakta ini dapat menjelaskan mengapa pemerintah mau berinvestasi di luar negeri, terutama di bidang infrastruktur, dan telah menciptakan lembaga khusus untuk mengelolanya dalam beberapa tahun terakhir (Penelope & Shan, 2017, p. 2).

Filipina berencana untuk meminjam $ 3,4 miliar dari Tiongkok. Setidaknya tiga proyek infrastruktur telah disepakati antara Tiongkok dan Filipina, terutama untuk proyek irigasi, pasokan air dan kereta api. Negara ini memiliki infrastruktur yang menua dan bertujuan untuk mengembangkan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan target 8% dan bersedia untuk membina hubungannya dengan Tiongkok. (Penelope & Shan, 2017, p. 3).

Mengingat masalah politik dan keamanannya, Filipina telah menghadapi kesulitan dalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Pada puncak sengketa teritorial, ia menghadapi penerapan aturan perdagangan dan peraturan komersial yang lebih ketat oleh otoritas Tiongkok. Hal ini terbukti ketika Tiongkok memberlakukan standar dan persyaratan ketat makanan dan keamanan pada tahun 2012 yang menyebabkan larangan impor pisang dari Filipina. Larangan itu diberlakukan setelah petugas karantina Tiongkok menemukan kutu putih di beberapa wadah pisang yang dikirim ke Tiongkok. Keputusan itu secara luas dilihat sebagai pembalasan Tiongkok terhadap Filipina di puncak perselisihan di Beting Scarborough (Wong A. C., 2017, p. 1).

Namun, karena asumsi kepresidenan Duterte telah mengadopsi gaya keterlibatan yang lebih ramah dengan Tiongkok. Pendekatan akomodasinya telah ditukar ulang oleh berbagai ikrar pinjaman dan investasi yang akan mendanai proyek pembangunan infrastruktur di Filipina. Hal yang paling penting, nelayan Filipina telah kembali ke kegiatan normal mereka, meskipun masih diawasi oleh Penjaga Pantai Tiongkok (Ranada, 2017).

## 2.4 ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PIHAK TIONGKOK

Haas menjelaskan mengenai para *stakeholder* yang menggunakan mode tawar-menawar strategis harus mampu memanfaatkan potensi yang tersedia yang mana dilakukan secara efisien dalam mencapai sebuah keuntungan atau akan menghasilkan sebaliknya (Haas, 2011, p. 376). Keuntungan tersebut didapatkan dengan adanya

*Linker* memberikan tawaran yang merujuk kepada keuntungan untuk *Linker*. Pembahasan aspek keuntungan dan kerugian ini menunjukkan persentase seberapa besar Tiongkok dalam meredakan ketegangan beberapa hal dari tujuan Tiongkok. Subbab ini akan menjabarkan dua aspek keuntungan dan kerugian dari pihak Tiongkok.

Satu hal yang sangat jelas untuk bisa didefinisikan sebagai aspek keuntungan dari Tiongkok ialah berhasilnya Tiongkok mempertahankan pembangunan pulau Shasa di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu Tiongkok juga berhasil dalam meredakan ketegangan klaim dari pihak Filipina yang beberapa tahun lalu sangat semangat menaruh protes terhadap tindakan dari Tiongkok. Keberhasilan Tiongkok ini bisa diterima oleh Filipina dengan menyodorkan bantuan investasi infrastruktur yang besar dari Tiongkok. Selain dengan membuat Filipina datang ke Tiongkok untuk menerima pembangunan perekonomian, Tiongkok juga mampu lebih meyakinkan Filipina memberikan pencerahan bahwa Tiongkok sebagai partner kerja sama dan saling menguntungkan.

Menurut Haas bahwa *Tactical Linkage* adalah cara mudah untuk meningkatkan keuntungan karena memperluas agenda dan manfaat yang akan diperoleh. Karena negosiasi dari penawaran tidak secara inheren, tentu saja adanya pengorbanan dari salah satu pihak yang mana tidak menimbulkan permasalahan dari negosiasi tersebut sehingga hal ini meningkatkan keuntungan pihak *Linker*. Pihak yang kuat *(Linker)* akan mendapatkan respon yang baik dari pihak yang lemah *(Linkee).* Kalaupun ada kerugian pada *Linkee* akan tetap mau karena *Linkee* juga merasa membutuhkan kemanfaatan

dari tawaran yang tersedia. Terlebih lagi, kemanfaatan tersebut lebih diperlukan sehingga kerugian menjadi tidak begitu dipermasalahkan (Haas, 2011, p. 373).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Haas di atas dengan adanya kerja sama saling ketergantungan ini dibuktikan dengan menjalankan Proyek BRI yang tentu saja dinilai Filipina sebagai potensi pembangunan perekonomian yang besar dan sangat menguntungkan bagi Filipina. Terlebih lagi, aspek keuntungan yang didapat oleh Tiongkok adalah bergesernya arah kerja sama dan kedekatan Filipina dari Amerika Serikat menuju ke arah Tiongkok yang penuh dengan harapan pembangunan (Michael, 2016).

Tiongkok merasakan keuntungan dengan respon yang baik dari Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menghidupkan kembali hubungan yang sempat renggang dengan Tiongkok sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016 dan sering mengkritik kebijakan keamanan Amerika Serikat. Dia telah menolak patroli gabungan yang direncanakan oleh Amerika Serikat dan angkatan laut Filipina di perairan Laut Tiongkok Selatan yang diperselisihkan bersama dengan latihan tempur bersama yang dapat menyinggung Tiongkok (Michael, 2016).

Pada akhir 2016, administrasi Duterte mengambil langkah untuk mengakomodasi kepentingan keamanan Beijing dengan mengorbankan kerja sama keamanan Manila dengan Washington. Pada bulan Desember 2016, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengumumkan bahwa tidak mungkin Manila akan mengizinkan militer Amerika Serikat untuk terus menggunakan Filipina sebagai basis untuk kebebasannya melakukan patroli navigasi di Laut Tiongkok Selatan. Duterte juga mengumumkan dia

tidak akan protes ketika dilaporkan bahwa Tiongkok sedang memasang senjata di pulau-pulau yang disengketakan jauh di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina (Renato Cruz De Castro, 2018).

Pada pertengahan Juli 2016 lalu, Duterte mengatakan bahwa dia ingin mengubah pendekatan konfrontatif Manila ke arah Tiongkok. Dia menyatakan keraguannya tentang kesediaan Amerika Serikat untuk datang ke dukungan Filipina dalam hal konfrontasi militer dengan Tiongkok atas klaim teritorial mereka yang bersaing. Pada arah kebijakan Filipina ini menjadi bagian dari *keuntungan* Tiongkok dalam mengambil kepercayaan kepala negara atau rezim Filipina (Kipgen, 2017).

Tiongkok berhasil dalam menjalankan tawaran BRI dengan mendapatkan beberapa keuntungan. Kerja sama ini dilakukan Tiongkok karena keuntungan maksimal, dan tidak ada kerugian yang besar atau signifikan bagi keberlangsungan Tiongkok dalam menjalankan tawaran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepercayaan dari Filipina untuk menjalankan BRI dengan Tiongkok. Tiongkok mampu mengarahkan Filipina untuk melepas ketegangan dari klaim Laut Tiongkok Selatan. Maka hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Haas terkait *Tactical Linkage* sebagai cara sederhana untuk memaksimalkan keuntungan yang terpisah dari para pihak, meskipun hasil dari perundingan mungkin merupakan kesepakatan dari pemerintah yang baru (Haas, 2011, p. 373).

# BAB III

# ANALISIS *LINKEE* FILIPINA MENERIMA TAWARAN *BELT AND ROAD INITIATIVE*

Bab III ini akan membahas bagaimana posisi Filipina Setelah menganalisis dari sudut pandang Tiongkok sebagai *Linker* pada Bab II. Maka bab ini akan membahas mengenai analisis dari sudut pandang Filipina sebagai *Linkee*. Adapun pembagian subbabnya pada Bab III ini akan dijabarkan menjadi empat subbab bagian yakni Filipina sebagai *Linkee*, Tujuan Filipina, penerimaan Filipina atas tawaran BRI serta Aspek Keuntungan dan Kerugani Filipina.

## 3.1 FILIPINA SEBAGAI *LINKEE*

Sebagaimana dijelaskan oleh Haas, mengenai konsep *Issue Linkage* adalah *linkee* yang menjalankan peranan yang cukup penting dalam hubungan dengan kerja sama. Berjalan atau tidaknya hubungan kerja sama dalam konteks *Issue linkage* pihak *Linkee* sangat berpengaruh untuk suksesnya tawaran dari *Linker* terkait menerima tawaran atau tidak (Haas, 2011, p. 372). Oleh karena itu, Filipina sangat sesuai untuk diposisikan sebagai *Linkee* pada tulisan ini.

Filipina diposisikan sebagai *Linkee* karena data mengatakan bahwa Filipina sangat terfokus kepada gugatan klaim terhadap wilayah teritorialnya yang menjadi pergerakan dari Tiongkok. Terlebih lagi, usaha itu gagal karena perbedaan kekuatan dan adanya

tolakan dari pihak Tiongkok untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa laut Tiongkok Selatan. Hal yang terjadi adalah Tiongkok yang menawarkan isu baru untuk menjalin hubungan pembangunan perekonomian yang lebih baik. Tujuannya adalah mengesampingkan ketegangan yang terjadi antara kedua negara ini dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

Keterlibatan Filipina ini tentu saja melalui perubahan haluan kepemimpinan presiden yang berkuasa. Tiongkok semakin yakin untuk melibatkan Filipina dalam proyek BRI di Maritim. Terlebih lagi, pergantian presiden Duterte membawa kedekatan dengan hubungan yang baik dengan Tiongkok untuk melancarkan BRI di Filipina. Duterte merasa yakin Filipina akan mendapatkan keuntungan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan Tiongkok karena penempatan Filipina menjadi *Linkee* adalah sebuah keputusan yang tepat bagi kemajuan perekonomian Filipina.

## 3.2 TUJUAN YANG INGIN DICAPAI FILIPINA

Hasil dari arbitrase internasional yang diajukan oleh pemerintahan Aquino sangat mungkin untuk mendukung Filipina. Hal ini memberi Duterte pengaruh dalam tawar-menawar dengan Tiongkok. Manila dan Beijing mungkin mencapai rekonsiliasi yang mana Filipina akan diminta untuk menggunakan pendekatan rendah terhadap hasil arbitrase dan beralih ke negosiasi bilateral dengan Tiongkok sebagai gantinya, Tiongkok akan memasukkan Filipina ke dalam BRI, memperluas investasi di Filipina

dan mencari kerja sama yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur (Times, 2016).

### 3.2.1 Tujuan Keamanan (klaim Kawasan Laut Tiongkok Selatan)

Tiongkok meloloskan Rencana Besar 2010-2020 untuk Konstruksi dan Pengembangan untuk Pulau Pariwisata Internasional Hainan. Di mana Kepulauan Spratly dan Paracel akan dimasukkan ke dalam kompleks laut multi tujuan. Terlebih lagi, rute wisata udara dan laut yang menuju Paracel akan dipromosikan, dan pendaftaran hak untuk menggunakan pulau tak berpenghuni akan didorong (China Ministry, 2010)**.**

Posisi Filipina dalam masalah Laut Tiongkok Selatan adalah Filipina mencari penghargaan deklaratori atas tiga hal yang saling terkait. Pertama, bahwa klaim Tiongkok mengenai hak dan kewajiban terkait perairan, dasar laut, dan fitur maritim Laut Tiongkok Selatan (berdasarkan hak historis dan seperti yang digambarkan dalam peta yang mengandung garis sembilan garis putus-putus) tidak valid karena tidak konsisten dengan Konvensi (DOC). Kedua, Filipina mencari kepastian apakah fitur-fitur maritim tertentu yang diklaim oleh Tiongkok dan Filipina di bawah Konvensi diklasifikasikan dengan tepat sebagai pulau, bebatuan, dataran rendah dari Jenis hak maritim yang mampu mereka hasilkan (Pemmaraju, 2016, p. 7).

Filipina memfokuskan pada hubungan ini, khususnya di Scarborough Shoal dan delapan fitur khusus dalam kelompok Pulau Spratly. Tujuan utama Filipina dalam

mengangkat dua masalah ini adalah untuk mempertanyakan klaim Tiongkok atas kedaulatan atas fitur-fitur maritim ini. Selanjutnya menggunakannya sebagai dasar untuk hak maritimnya. Ketiga, Filipina mendeklarasikan bahwa Tiongkok melanggar Konvensi dengan mengganggu pelaksanaan hak dan kebebasan kedaulatan Filipina di bawah Konvensi dan melalui kegiatan konstruksi dan penangkapan ikan yang telah merusak lingkungan laut (Pemmaraju, 2016, p. 7).

Terkait keinginan Filipina di atas menggerakkan Majelis Arbitrase yang dibentuk di bawah Annex VII *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) untuk memeriksa berbagai klaim yang diajukan oleh Filipina tidak kurang dari 15 pengajuan gugatan. Submisi yang diperiksa memiliki beberapa tujuan dan gugatan yang berisikan sebagai berikut. Hal yang berhubungan dengan klaim yang lebih luas dari Tiongkok yang memiliki hak maritim di Laut Tiongkok Selatan yang menurut pandangan Filipina melampaui yang disediakan oleh UNCLOS (Gau, 2015, p. 55).

Kemudian, lebih lanjut, Filipina meminta pernyataan dari Tribunal bahwa klaim Tiongkok berdasarkan garis sembilan tidak konsisten dengan UNCLOS dan tidak valid. Selain itu adanya gugatan terkait status kawanan Scarborough, Mischief Reef, Second Thomas Shoal, dan Subi Reef. Adapun kegiatan Tiongkok di Thomas Shoal, Filipina mengklaim sebagai pencegahan dari melaksanakan haknya menempatkan pasukannya di kawanan dan navigasi di sekitarnya. Serta serangkaian perselisihan mengenai kegiatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang sah disengketakan oleh Filipina (Gau, 2015, p. 55).

Beberapa usaha klaim di atas yang disebutkan adalah menjadi tujuan kepentingan Filipina atas klaim Laut Tiongkok Selatan di wilayah Filipina oleh Tiongkok. Tujuan keamanan klaim wilayah untuk kembalinya menjadi kepemilikan utuh adalah tujuan terbesar Filipina dalam sengketa dengan Tiongkok. Selain itu, Filipina juga menginginkan wilayahnya netral dari kegiatan militer dari Amerika Serikat maupun Tiongkok itu sendiri. Secara terbuka Filipina telah menolak patroli gabungan yang direncanakan oleh Amerika Serikat dan angkatan laut Filipina di perairan Laut Tiongkok Selatan yang diperselisihkan bersama dengan latihan tempur bersama (Gregory B. Poling, 2018).

### 3.2.2 Tujuan Ekonomi (Realisasi *Belt and Road Initiative*)

Meninjau keadaan Filipina yang membutuhkan kemajuan dengan pembangunan perekonomian untuk menindaklanjuti rancangan pembangunan infrastruktur kedepan. Salah satu tujuan yang diinginkan Filipina yakni terealisasikan dengan adanya proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di *Maritime Silk Road* (MSR). Tiongkok mendeklarasikan keterlibatan Filipina menjadi bagian dari proyek yang telah direncanakan oleh Tiongkok. Rencana infrastruktur pelabuhan di negara ini seefisien mungkin akan menekan untuk bebas korupsi, walaupun menjadi suatu hal yang susah, akan tetapi hal ini menjadi hal penting untuk dilaksanakan (Rabena, 2018, p. 688).

Keterlibatan Filipina di proyek ini akan mempengaruhi pada tantangan logistik, politik, dan keuangan. Kebijakan ekonomi makro yang baik dan percepatan

pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Filipina yang baru-baru ini disetujui 2017-2022 terbukti menjadi waktu dan kepentingan yang strategis (Rabena, 2018, p. 688). Filipina memulai dengan lingkungan yang mendukung untuk keberhasilan proyek infrastruktur dan pembangunan perekonomian negara. Keberhasilan pelaksanaan BRI tidak hanya bergantung pada seberapa baik hubungan antara Tiongkok dan Filipina, tetapi juga pada perencanaan infrastruktur yang efisien dan bersih oleh pemerintah Filipina (Darlene, 2017).

## 3.3 PENERIMAAN FILIPINA TERHADAP TAWARAN BRI

Haas menerangkan kembali terkait kredibilitas dari *Tactical Linkage* yang tergantung pada persepsi dari kemampuan dan kemauan dari para *Linkee* untuk menerima tawaran kolaborasi kerja sama. pada posisi ini, penggunaan kekuasaan selalu dibatasi oleh persepsi interdependensi kompleks yang mendorong para pihak untuk bernegosiasi untuk mencapai tujuannya secara kolektif (Haas, 2011, p. 372). Sehingga pihak *Linkee* mempunyai kendali sendiri akan menerima tawaran atau bahkan menolaknya. Hal ini tergantung pada seberapa besar pihak *Linkee* merasa keuntungannya daripada kerugiannya.

### 3.3.1 Perubahan Kepentingan Filipina di Laut Tiongkok Selatan

Ketegangan maritim yang belum terselesaikan antara negara Tiongkok dan Filipina dapat mempengaruhi masa depan komitmen investasi dan pendanaan. Pada

peringkat popularitas Presiden Duterte, ada kekhawatiran yang berkembang tentang ketidaksesuaian antara kecepatan Tiongkok membangun struktur di pulau Sansha yang disengketakan. Ketidaksesuaian tersebut tidak sebanding dengan sedikitnya kemajuan sebenarnya telah dibuat pada proyek infrastruktur atau aliran *Philippines Foreign Direct Investment* (FDI) yang telah diterima Filipina dari Tiongkok sejauh ini. Tiongkok telah membangun struktur yang mampu menampung pesawat tempur dan kapal perang di daerah yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan bahkan setelah Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 yang mencampakkan klaim Beijing atas sebagian besar perairan tanpa dasar hukum (Lopez, 2018).

Sementara Tiongkok dengan pengembangan secara terus-menerus militer dari berbagai terumbu dan atol telah berubah menjadi pulau buatan selama beberapa tahun terakhir yakni menjadi pulau Sansha. Hal ini telah semakin jauh dari memperkuat cengkeramannya di Scarborough Shoal. Militerisasi kepulauan buatan yang baru didirikan dapat diartikan sebagai bukti ketegasan Tiongkok dan tindakan agresif yang terus berlanjut. Pemerintah Duterte terkait inti masalahnya bukan pengembangan lanjutan dari pulau Sansha, tetapi apakah Tiongkok berhenti untuk membangun pulau lainnya (Maritime, 2017).

Perkembangan sehubungan dengan eksplorasi bersama. Kedua pemerintah telah berdiskusi terus menerus mengenai hal ini. Tiga perkembangan perlu dicatat yang dapat membantu membentuk wacana baru tentang eksplorasi dan pengembangan bersama tanpa dibatasi waktu secara langsung menghadapi masalah terkait hukum dengan eksplorasi di wilayah Laut Tiongkok yang disengketakan. Menindaklanjuti

ketegangan yang disengketakan, Tiongkok telah memberi tawaran oleh *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) kontrak untuk pendirian fasilitas gas alam lapis baja pertama di Filipina (Diplomacy, 2018).

Departemen Luar Negeri Filipina memberi akses bagi penelitian ilmiah kelautan bersama antara Institut Kelautan Tiongkok dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan Institut Ilmu Kelautan Universitas Filipina di perairan timur Filipina (Pazzibugan, 2018). Tiongkok telah mencoba untuk menenangkan perairan dengan secara eksplisit. Hal ini dengan membingkai penelitian yang dilakukan dalam air di bawah yurisdiksi Filipina dan juga bertujuan menciptakan suasana yang baik untuk pengembangan hubungan bilateral (Xinhua, 2018).

Secara bersamaan, Menteri Luar Negeri Filipina Cayetano mengungkapkan bahwa kedua negara akan membahas bagaimana menerapkan eksplorasi bersama di wilayah yang disengketakan tanpa menyinggung klaim teritorial Laut Tiongkok Selatan. Tujuan dari diskusi itu adalah kesepakatan bahwa eksplorasi bisa dijalankan dengan sesuai hukum Filipina dan hukum Tiongkok. Oleh karena itu, Pemerintah Duterte secara tidak langsung sangat condong sekali ke arah Tiongkok dari berbagai hal. Bahkan selain penerapan *Belt and Road Initiative,* rezim Duterte telah menyetujui pembangunan eksplorasi dengan kerja sama eksplorasi bersama (Pazzibugan, 2018).

### 3.3.2 Revitalisasi Hubungan Ekonomi

Filipina dapat memperoleh keuntungan secara ekonomi dari perbaikan hubungan bilateral. Ekspor Filipina yang telah mengalami penurunan selama tahun terakhir Kepresidenan Aquino naik lagi di bawah Duterte. Ekspor keseluruhan ke Tiongkok mencapai US $ 5.713 juta selama tahun terakhir Aquino dibandingkan dengan US $ 6.913 juta selama tahun pertama Duterte (Kreuzer, 2018, p. 19).

Pariwisata Tiongkok juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 39% untuk periode yang sama tahun 2017. karena kunjungan Duterte ke Tiongkok pada bulan Oktober 2017, Tiongkok mencabut peringatan perjalanannya ke Filipina yang telah dikeluarkan pada tahun 2014. Selain itu, Filipina mengubah kebijakan visa mereka untuk orang Tiongkok (Jianhua, 2018).

Filipina telah menerima lebih dari 972.000 turis Tiongkok dan mencapai 34,9 persen peningkatan tahun ke tahun. Filipina memiliki alasan untuk mengharapkan lebih dari 1,5 juta turis Tiongkok mengunjungi Filipina tahun ini dan menghasilkan pendapatan lebih dari 32 miliar Peso secara total. Kota dan pelabuhan utama Filipina seperti Manila dan Cebu telah membuka penerbangan langsung ke Beijing, Shanghai, Guangzhou dan Nanning, serta rute berlayar ke pelabuhan Teluk Beibu, pelabuhan Xiamen dan pelabuhan Shanghai (Jianhua, 2018).

Investasi infrastruktur Tiongkok ke Filipina perlahan mendapatkan daya tarik. Berbagai proyek yang digagas selama kunjungan Presiden Filipina Duterte ke Tiongkok dikembangkan lebih lanjut. Realisasi tersebut meliputi Proyek Bendungan Kaliwa dan Proyek Irigasi Pompa Sungai Chico untuk Proyek Kereta Api Utara

Selatan, sepanjang jalan menuju proyek Jembatan Binondo Intramuros dan Estrella Pantaleon yang menghubungkan bagian utara dan selatan Metro Manila. *China Development Bank* dan *Bases Conversion* dan *Development Authority Filipina* juga menandatangani untuk membangun kerangka kerja bagi kerja sama keuangan beberapa proyek hingga US $ 4,5 miliar (Kreuzer, 2018, p. 21).

Pembiayaan Tiongkok juga datang untuk Proyek Long Haul South Railways Filipina Selatan yang akan membangun kereta api sepanjang 581 km dari Manila ke Kota Batangas, Kota Legaspi dan Matanog. Lebih lanjut, perusahaan milik negara Tiongkok menawar di sejumlah proyek pekerjaan umum di Filipina, seperti, misalnya, gedung terminal bandara Internasional Clark yang baru. Bagi Filipina, kegiatan-kegiatan ini dengan jelas memberi isyarat bahwa Tiongkok akhirnya memasukkan Filipina dalam BRI (Warwick, 2018).

Filipina memperoleh momentum positif dalam memperbarui hubungan politik dan keamanan dengan Tiongkok. Terlepas dari putusan arbitrase yang menguntungkan, karena kemampuan angkatan lautnya yang lemah, Filipina tidak dapat memaksakan hak maritimnya dan menantang barikade Penjaga Pantai Tiongkok di Beting Scarborough. Dialog bilateral tingkat tinggi yang lebih luas mengenai sengketa maritim telah dilanjutkan setelah partisipasi Duterte dalam Pertemuan Tingkat Tinggi BRI di Beijing Mei lalu (Rabena, 2018, p. 686).

Pemanasan hubungan bilateral setelah bertahun-tahun hubungan dingin dapat dikaitkan dengan kebijakan pragmatis Duterte. Terbukti, ia berangkat dari pembangkangan pemerintahan Aquino melawan ketegasan Tiongkok di Laut Filipina

Barat. Dan sebaliknya, Duterte memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam mengelola ketegangan di daerah tersebut dengan tidak mengambil tindakan militer setelah putusan pengadilan, sambil mengumpulkan berbagai konsesi ekonomi dalam prosesnya (Wong A. C., 2017).

Duterte menilai bahwa lebih fokus pada perdagangan dan aspek ekonomi hubungan Filipina dengan Tiongkok. Pada akhirnya akan menguntungkan rakyat Filipina lebih dari sekedar memaksakan klaim maritim nasional yang tidak bisa diterapkan. Kebijakan Ini mungkin tampak sebagai taktik ekonomi yang sangat oportunistik, dan mungkin hampir tampak bahwa Filipina meninggalkan keamanan maritimnya. Tetapi penyesuaian kebijakan luar negeri Duterte memiliki dasar logis yang mencerminkan pendekatan perhitungan dan bisnisnya (Wong A. C., 2017).

Filipina memiliki keuntungan terbesar dari BRI melalui investasi infrastruktur, bahkan ketika ketegangan geopolitik dan penundaan konstruksi tidak membebani pembangunan perekonomian ini. Tiongkok telah menjanjikan sekitar $ 7,34 miliar dalam bentuk pinjaman lunak dan hibah untuk Filipina selama dua tahun. Administrasi Duterte mengandalkan pendanaan yang mudah untuk mendukung program infrastruktur yang membutuhkan sekitar $ 15 miliar hingga tahun 2022. Janji investasi Beijing menyumbang 10,5% dari produk domestik bruto. Filipina menandatangani enam perjanjian di Forum Boao di China, yang mencakup $ 62 juta kredit untuk Proyek Irigasi Pompa Sungai Chico dan hibah ekonomi dan kerja sama membiayai infrastruktur dan proyek lainnya (Lopez, 2018).

Kebijakan Filipina di bawah Duterte telah menjadi undangan terbuka untuk kembali dan memperluas praktek-praktek kerja sama sebelumnya. konflik dalam kerangka kerja sama yang lebih luas seperti yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan mampu diredakan. Oleh karena itu, pendekatan Tiongkok ke Filipina lebih mudah dan lancar dibandingkan dengan kepemimpinan Beniqno.

### 3.4 ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PIHAK FILIPINA

Sama seperti pembahasan keuntungan dan kerugian Tiongkok, Haas menjelaskan mengenai para *stakeholder* yang menggunakan mode tawar-menawar strategis harus memanfaatkan potensi yang tersedia yang mana dilakukan secara efisien dalam mencapai sebuah keuntungan atau kerugian (Haas, 2011, p. 376). Maka dari itu, subbab ini akan menjelaskan terkait keuntungan dan kerugian Filipina sebagai *Linkee*. Sehingga akan menemukan kesesuaian terhadap permasalahan Laut Tiongkok Selatan yang mampu reda oleh berjalannya BRI.

Masuknya Filipina bagian dari BRI membuktikan kecurigaan yang tersebar luas di Manila, ketika Filipina adalah anggota dari BRI. Mengingat bahwa peta-peta sebelumnya yang diterbitkan oleh Tiongkok tidak termasuk rute yang melintasi atau meliput Filipina. Pada pemerintahan Duterte, membuka jalan dari kemitraan komprehensif dengan Tiongkok yang berdalih pendekatan utama terhadap masalah Laut Tiongkok Selatan menghasilkan respon positif dari Filipina. Terlebih lagi,

Filipina tampak jelas dalam mekanisme bilateral yang telah dibentuk “misalnya, Mekanisme Konsultasi Bilateral dan Komite Penjaga Pesisir Bersama” (Placido, 2017).

Kunjungan tingkat tinggi juga telah dilanjutkan oleh Duterte melakukan dua perjalanan ke Tiongkok dalam 7 bulan pertama. Selain itu, pihak Tiongkok melakukan tiga kunjungan tingkat tinggi (Wakil Perdana Menteri Wang Yang, Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan Perdana Menteri Li Keqiang) ke Filipina dalam periode waktu yang sama. Selain itu, persepsi masyarakat Filipina tentang Tiongkok juga berubah, dengan semakin banyak orang Filipina mulai percaya bahwa Tiongkok sudah menjadi ekonomi terdepan di dunia dan menjadi kiblat perekonomian bagi Filipina (Bishop & Poushter, 2017).

BRI datang pada saat yang tepat, karena Filipina mempunyai permasalahan infrastruktur yang telah menjadi kemunduran besar dalam mempromosikan pembangunan industri dan nasional negara. Indeks Daya Saing Global dari Forum Ekonomi Dunia infrastruktur Filipina ASEAN “jalan, rel kereta api, pelabuhan, transportasi udara, listrik, dan telekomunikasi” menempati peringkat ketujuh dari sembilan negara (Rabena, 2018, p. 689).

Tidak hanya itu saja, di Manila misalnya, sebanyak US $ 70 miliar terbuang setiap tahun karena ketidakefisienan yang disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang tepat. Dari sudut pandang keamanan, pendirian Pertahanan Filipina percaya bahwa BRI dapat membantu dalam mengatasi masalah pemberontakan dan ketidakstabilan politik di Mindanao karena pembangunan infrastruktur menghasilkan proliferasi peluang ekonomi (GMA News, 2017).

Mengingat kinerja ekonomi Filipina yang terus meningkat, tumbuh 6,7% tahun 2016. Filippina dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mencapai inklusivitas melalui investasi infrastruktur yang lebih banyak. Sejak kunjungan Duterte ke Tiongkok pada tahun 2016, lebih dari 20 perjanjian bilateral telah ditandatangani, yang mencerminkan bagaimana Tiongkok memajukan kerja sama dalam lima dimensi utama kerja sama BRI (Rabena, 2018, p. 689).

Golden Age of Infrastructure adalah pengembangan dan Upaya pertumbuhan ekonomi pemerintahan Duterte dari pengeluaran besar-besaran dengan mengalokasikan $ 170 miliar atau 7,4% dari GDP atau *Produk Domestik Bruto* (PDB) untuk pembangunan infrastruktur dan modernisasi pada 2022 (Diokno, 2017). Program yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Filipina (2017–2022), merupakan bagian dari Ambisyon Natin 2040 "visi jangka panjang" dengan tujuan inklusivitas dan desentralisasi pusat pertumbuhan di Filipina. Pemerintah Filipina mengharapkan bahwa investasi infrastruktur akan mendorong pertumbuhan PDB menjadi 7%-8% dari 2018 hingga 2022 (dari 6,2% dalam 6 tahun terakhir) dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 3%-5% (dari 5,5% pada tahun 2016) dan tingkat kemiskinan menjadi 14,6% (dari 21,6% pada tahun 2015) (Rabena, 2017).

BRI mendukung Filipina untuk perdagangan bebas. Filipina akan mengembangkan pasar baru dan memperdalam hubungan regional. serta lebih banyak transaksi pelabuhan dan bandara meningkatkan biaya transportasi secara signifikan. Industri manufaktur Filipina, khususnya produsen elektronik dan sektor ekspor makanan akan menjadi penghasil terbesar. Tiongkok telah menjanjikan US $ 7,34

miliar pinjaman lunak atau bantuan pengembangan resmi dan hibah untuk proyek infrastruktur Filipina pada kedua kerja sama “pembangunan infrastruktur dan konektivitas”, berskala besar serta masuk dalam program-program unggulan (Padilla, 2018). Jumlah ini merupakan bagian dari perjanjian senilai 24 miliar dolar Beijing yang dikomitmenkan kepada Duterte dalam kunjungan pertamanya ke Tiongkok pada 2016 (Cheng, 2016).

Menariknya, dari 2016 hingga 2017, Pinjaman dan hibah dari Tiongkok mencatat kenaikan sebesar 5.862% (Calonzo, 2018). Menurut Departemen Perdagangan dan Industri, $ 24 miliar dalam perjanjian komersial, Filipina dengan Tiongkok diperkirakan menciptakan dua juta pekerjaan di Filipina (Ranada, 2016). Sebanyak US $ 7,34 miliar, yang dibagi menjadi dua komponen sebagai penindaklanjutan rencana termasuk 10 proyek tiket besar yakni dua jembatan di Metro Manila, dua pusat rehabilitasi narkoba di Mindanao (Placido, 2017).

Terkait keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pihak *Linkee*, Haas menjelaskan bagaimana *Tactical Issue Linkage* adalah taktik negosiasi yang menghindari ketergantungan pada hubungan intelektual di antara isu-isu yang terkait. Pihak yang lebih lemah *(Lnkee)* akan mengesampingkan kepentingan yang tidak tercapai dengan menerima kesepakatan bahkan jika beberapa masalah gagal diselesaikan. Negosiasi yang diterima oleh *Linkee* di antara isu-isu belum tentu optimal (Haas, 2011, p. 373). Dengan kata lain, pihak *Linkee* mempunyai dua dampak dari keuntungan dan kerugian. Namun, resiko dari kerugian Filipina dikesampingkan demi keuntungan pembangunan perekonomian yang prospek kemajuannya akan lebih besar.

Dari serangkaian tuntutan yang telah diajukan oleh Filipina, Tiongkok menolak untuk arbitrase oleh Filipina dan berpegang pada posisi tidak menerima atau berpartisipasi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pengadilan internasional atau lebih dikenal dengan ICJ "International Court of Justice" tidak menerima yurisdiksi tanpa adanya persetujuan dari pihak tertuntut karena isu-isu mengenai interpretasi dan penerapan Konvensi dapat timbul hanya setelah kedaulatan negara atas fitur maritim ditentukan. Tiongkok menunjukkan fitur maritim tidak memiliki hak maritim atau hak apapun ketika tidak tunduk pada kedaulatan negara yang mana dalam artiannya, wilayah maritim tidak memiliki hak apapun ketika tidak termasuk dalam wilayah kedaulatan suatu negara (Holmes O. , 2016).

Tiongkok keberatan dengan pemilihan fitur maritim tertentu untuk tujuan menilai kelayakan wilayah tersebut untuk menghasilkan zona maritim. Klaim Tiongkok adalah untuk kedaulatan atas seluruh Kepulauan Nansha (Spratly) merupakan kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, khususnya (Taiping Dao), pulau terbesar dan daerah maritim lainnya. Akan tetapi Taiping Dao (Abu Island) di Kepulauan Nansha (Spratly) saat ini dikendalikan oleh pihak berwenang Taiwan. Penyerahan Filipina dalam hal ini juga mengecualikan beberapa bagian lain dari Kepulauan Nansha (kelompok Kepulauan Spratly) (Myers, 2018).

Tiongkok menganggap bahwa bagian-bagian pulau yang dikecualikan oleh Filipina berada di bawah pendudukan ilegal. Pengecualian ini merupakan penyimpangan dari nilai dan batasan perselisihan Tiongkok dengan Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Mengenai kategori klaim yang diajukan oleh Filipina, Tiongkok

berpendapat bahwa legalitas tindakan Tiongkok dalam perairan Nansha (Spratly) dan Huangyan Dao (Scarborough Shoal) bersandar pada kedua kedaulatannya atas fitur maritim yang relevan dan hak maritim yang diturunkan darinya (Calvo, 2015).

Namun demikian, menurut Mark J. Valencia yang mengatakan bahwa administrasi Duterte harus berhati-hati untuk tidak mengurangi klaim atau haknya dalam Laut Tiongkok Selatan. Ia harus terus memprotes secara pribadi atau publik ketika percaya Tiongkok telah melanggar pemahaman atau rincian hasil arbitrase itu sendiri. Oleh karena itu, Filipina harus menghindari dari pernyataan resmi atau mengambil tindakan apa pun yang bersentuhan langsung dengan klaimnya, termasuk mengakui atau bahkan menyiratkan bahwa setiap area yang secara hukum menjadi miliknya yang disengketakan. Namun, putusan panel arbitrase sekarang menjadi bagian dari hukum internasional dan tidak mungkin berubah dengan mudah atau cepat (Valencia, 2018).

# BAB IV

# KESIMPULAN

## 4.1 KESIMPULAN

Sengketa Laut Tiongkok Selatan dilatarbelakangi oleh adanya klaim Tiongkok dengan menggunakan Nine-Dash Line sebagai landasan hukum Tiongkok. Tiongkok pembangunan pulau dan kegiatan militer di daerah teritorial Filipina yang telah disahkan menjadi bagian dari wilayah Filipina. Hal ini berdampak pada klaim dari Filipina dengan tegas menolak keputusan Tiongkok hingga mengajukan gugatan kepada pengadilan internasional *International Court of Justice* (ICJ). Puncak ketegangan konflik ini pada tahun 2010 dengan beberapa gugatan Filipina secara aktif.

Gugatan Filipina tidak menuai hasil karena dari pihak Tiongkok sendiri tidak menyetujui gugatan klaim yang diajukan. Oleh karena itu, gugatan yang dilontarkan tetap saja tidak mampu membuat Tiongkok mundur dari klaim di Laut Tiongkok Selatan. Maka dari hal ini, hubungan kedua negara mengalami kerenggangan kerja sama salah satunya terkait impor dan ekspor. Di sisi lain, Tiongkok mempunyai rancangan kerja sama pembangunan ekonomi yang akan menjadi jembatan untuk mempererat kembali hubungan Tiongkok dengan Filipina menggunakan *Belt and Road Inisiative* (BRI).

Namun demikian, melalui penawaran dari Tiongkok pengajuan kerja sama perekonomian dengan menjalankan BRI. Tawaran tersebut berisikan pembangunan perekonomian Filipina pada bagian infrastruktur dan pembukaan jalur perdagangan

Maritim di Filipina. Tentu saja tawaran tersebut merupakan prospek jangka panjang bagi Filipina. Permasalahan konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan Filipina adalah menggunakan *Issue Linkage* sebagai alat bantu untuk menganalisis penelitian ini. Karena *Issue Linkage* adalah menghubungkan dua isu yang berbeda yakni keamanan dengan ekonomi. Keamanan pada kasus ini adalah isu Laut Tiongkok Selatan dipadukan dengan ekonomi yakni isu *Belt and Road Initiative*.

Pada Bab 1 telah diuraikan permasalahan konflik Laut Tiongkok Selatan dengan adanya ketidakkonsistenan dari Tiongkok menjalankan *Declaration Of the Conduct* (DOC). Selain itu adanya pengajuan kerja sama pembangunan ekonomi melalui BRI yang disetujui oleh Filipina. Pada Bab 1 pula dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan yakni konsep *Issue Linkage* yang diperkenalkan oleh Ernst B. Haast. Oleh karena itu, landasan teori tersebut membantu dalam menjawab rumusan masalah skripsi ini yaitu Bagaimana Upaya Tiongkok dalam meredakan ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap Filipina tahun 2013-2018?.

Pada Bab II telah dijelaskan mengenai analisis dari sudut pandang Tiongkok sebagai *Linker* (penghubung). Penempatan Tiongkok sebagai penghubung dalam kasus Laut Tiongkok Selatan memiliki kesempatan untuk menawarkan isu lainnya dengan kerja sama ekonomi kepada Filipina. Pada Bab II juga dijelaskan bahwa tujuan Tiongkok meliputi dua tujuan yaitu keamanan dan ekonomi. Tujuan keamanan Tiongkok adalah untuk mengamankan kawasan Laut Tiongkok Selatan dari beberapa ancaman militer luar terutama militer Amerika Serikat yang berada di Filipina. Selain itu mengamankan ancaman ketegangan dari gangguan Filipina pada kegiatan Tiongkok

di kawasan tersebut. Tujuan ekonomi Tiongkok adalah mengeksplorasi kekayaan yang terdapat di Laut Tiongkok Selatan, pembangunan pulau Sansha sebagai transit jalur perdagangan, serta pelaksanaan proyek BRI di Filipina. Oleh karena itu untuk mendapatkan tujuannya, Tiongkok memberikan tawaran terhadap Filipina dengan pembangunan perekonomian di bidang infrastruktur dan pembukaan jalur Maritim yang keduanya masuk dalam proyek BRI.

Sementara itu di Bab III telah dipaparkan mengenai analisis dari sudut pandang Filipina sebagai *linkee*. Penempatan Filipina sebagai *linkee* dikarenakan penerimaan tawaran kerja sama pengembangan isu lainnya oleh Tiongkok. Posisi Filipina sebagai *linkee* cukup vital. Sesuai argumen Haas, Terjalin atau tidaknya suatu hubungan kerja sama dalam konteks *issue linkage* tergantung persepsi *linkee* dalam menerima tawaran dari *linker*. Sama halnya Tiongkok, Filipina juga mempunyai Tujuan keamanan dan ekonomi. Tujuan keamanan keamanan Filipina adalah untuk menetralisasikan kawasan Filipina dari campur tangan pihak luar.

Keuntungan Filipina yang sejalur dengan tujuan ekonomi Filipina adalah pembangunan perekonomian di bidang infrastruktur dan pembukaan jalur Maritim. Yakni adanya kesesuaian dengan Rencana Infrastruktur Filipina dengan rencana pembangunan Filipina 2017-2022. Pembangunan infrastruktur akan fokus pada sistem transportasi, sumber daya air, energi, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan infrastruktur sosial. Prioritas akselerasi infrastruktur telah menjadi jelas dalam alokasi administrasi Philippine Development Plan (PHP) 847,2 miliar dalam APBN 2017, yaitu 5,3 persen dari produk domestik bruto Filipina (PDB).

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Haas mengenai *Tactical Linkage* memberikan celah keuntungan untuk kedua pihak walaupun keuntungan tersebut tidak proporsional antara pihak *Linker* dan pihak *Linkee.* Hal ini dibuktikan dengan keuntungan Tiongkok menjadi *Linker* lebih besar dibandingkan Filipina dengan Tiongkok meniadakan kerugian yang didapati. Tawaran Tiongkok dengan Isu BRI mampu mengoptimalkan keuntungan Tiongkok dalam meredakan ketegangan hubungan dengan Filipina. Keberhasilan ini dibuktikan dengan dukungan Filipina terhadap Proyek BRI yang dipandang jauh lebih besar keuntungannya jika Filipina bergabung dengan Tiongkok terkait kerja sama ini.

Meskipun kedua isu yang dihubungkan tidak inheren, penjelasan Haas mengenai Pihak yang lebih lemah *(Lnkee)* akan mengesampingkan kepentingan yang tidak tercapai dengan menerima kesepakatan bahkan jika beberapa masalah gagal diselesaikan. Filipina sebagai *Linkee* tentu saja mempunyai alasan untuk menerima tawaran tersebut dengan adanya keuntungan yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu, pada posisi *Linkee*, Filipina juga mengesampingkan kepentingan yakni dengan tidak tercapainya tujuan keamanannya. Sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai kerugian pihak *Linkee* (Filipina).

**Komparasi Issue Linkage Tiongkok dengan Filipina dalam konflik Laut Tiongkok Selatan**

| | **Tiongkok** | **Filipina** |
|---|---|---|
| Peran | *Linker:* Pihak yang memberi tawaran | *Linkee:* Pihak yang menerima tawaran kerja sama |
| Tujuan | **Keamanan :** Tiongkok mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan mendirikan pulau Sansha dan mengamankan jalur perdagangan yang mana Laut Tiongkok Selatan sebagai gerbang utama jalur perdagangan Tiongkok melalui laut.<br>**Ekonomi :** Tiongkok mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam yang terdapat di kawasan Laut Tiongkok Selatan. | **Ekonomi :** Filipina menginginkan terealisasikan dengan adanya proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Maritime Silk Road (MSR). Pembangunan infrastruktur dengan penerimaan investasi sebesar US $ 4,5 miliar. Memperbaiki layanan infrastruktur Filipina.<br>**Keamanan :** Filipina menginginkan Tiongkok menarik klaimnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan serta menjadikan wilayah territorial Filipina netral dari intervensi Amerika Serikat bahkan Tiongkok. |
| Alasan memberi tawaran/ alasan menerima tawaran *(Linking the Issues)* | Tiongkok memberikan tawaran kerja sama investasi melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai upaya meredakan ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan. | Filipina menerima tawaran kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI) karena adanya perubahan kepentingan Filipina dari pergantian kepemimpinan presiden. Selain itu Filipina menerima tawaran yakni karena adanya refitalisasi perekonomian dengan investasi untuk pembangunan perekonomian di bidang infrastruktur. |
| keuntungan | • Tiongkok mempertahankan pembangunan pulau Shasa | • Kesesuaian dengan Rencana Infrastruktur Filipina |

| | | |
|---|---|---|
| | • Tiongkok juga berhasil dalam meredakan ketegangan klaim dari pihak Filipina<br>• Bergesernya arah kerja sama dan kedekatan Filipina dari Amerika Serikat menuju ke arah Tiongkok<br>• Tiongkok mengeksplorasi kawasan Laut Tiongkok Selatan (wilayah Paracel dan Spartly) tanpa adanya gugatan klaim dari Filipina | • Rencana Pembangunan Filipina 2017-2022, pembangunan infrastruktur akan fokus pada sistem transportasi, sumber daya air, energi, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan infrastruktur sosial.<br>• Prioritas akselerasi infrastruktur telah menjadi jelas dalam alokasi administrasi *Philippine Development Plan* (PHP) 847,2 miliar dalam APBN 2017, yaitu 5,3 persen dari produk domestik bruto Filipina (PDB). |
| kerugian | Tiongkok tidak mendapatkan kerugian secara signifikan karena memberikan tawaran proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) | • ketidak jelasan status wilayah territorial Filipina terkait daerah Spartly dan Paracel yang diklaim oleh Tiongkok<br>• Filipina tidak mampu mengembalikan teritorialnya yang diklaim Tiongkok. |

## 4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Adapun beberapa rekomendasi dari penulis yakni supaya penelitian akan lebih komprehensif. Sehingga akan memperluas cakupan dari penelitian tersebut. Penelitian selanjutnya akan sangat menarik jika membahas mengenai kasus Laut Tiongkok Selatan dengan melibatkan pihak Vietnam ke dalam konflik Filipina dengan Tiongkok. Selain itu, Perubahan haluan pemerintahan Filipina pada periode Beniqno Aquino dengan

Rodrigo Duterte menjadikan alasan kemajuan atau kemunduran Filipina terkait pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah lebih jelas menerangkan aspek perubahan kepentingan antara kedua presiden tersebut.

Tulisan ini belum menunjukkan kontribusi ASEAN yang berfungsi memayungi anggota negaranya dari beberapa konflik luar seperti konflik Laut Tiongkok Selatan. Sehingga penelitian selanjutnya akan lebih baik jika melibatkan ASEAN sebagai instansi regional lebih kuat dibandingkan negara. Bukan sebagai instansi yang berdiri dengan fungsinya yang kosong atau sebagai formalitas saja. Kasus Laut Tiongkok Selatan masih belum terselesaikan. Terlebih lagi antara Pihak Tiongkok dengan pihak Amerika Serikat yang sering kali menjadi ketegangan sendiri di kawasan ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk bisa fokus kepada kepentingan Tiongkok dan kepentingan Amerika Serikat yang walaupun bukan anggota UNCLOS namun banyak keterlibatan dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA


Albert, B. X. (2017, Februari 17). *Media Censorship in China*. Diambil dari Council on Foreign Relation: https://www.cfr.org/-backgrounder/media-censorship-china

Allen, B. (2016, Juli 12). *After South China Sea Ruling, China Censors Online Calls for War*. Diambil dari foreignpolicy: http://foreignpolicy.com/-2016/07/12/after-south-china-sea-ruling-china-censors-online-calls-for-war-unclos-tribunal/

Banerjee, D. (2016). China's One Belt One Road Initiative-An Indian Perspective. *ISEAS, No. 14*, 1-10.

Bautista, L. (2007). Thinking Outside the Box: The South China Sea Issue and the United Nations Convention on the Law of the Sea (Options, Limitations and Prospect). *Philippine Law Journal, Vol. 81, No. 4*, 699-731.

Bishop, C., & Poushter, J. (2017, September 21). *People in the Philippines still favor U.S. over China, but gap is narrowing*. Diambil dari Pew Research Center: http://www.pewglobal.org/2017/09/21/people-in-the-philippines-still-favor-u-s-over-china-but-gap-is-narrowing/

Bisley, N. (2016, Oktober 27). *What Does China Actually Want in the South China Sea?* Diambil dari The National Interest: https://nationalinterest.org/feature/what-does-china-actually-want-the-south-china-sea-18211

_____. (2017, Oktober 27). *What Does China Actually Want in the South China Sea?*. Diambil dari The National Interest: https://nationalinterest.org/feature/what-does-china-actually-want-the-south-china-sea-18211

Bouchat, C. J. (2014). *The Paracel Islands And U.S. Interests And Approaches In The South China Sea*. Carlisle: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press.

Calonzo, A. (2018, April 12). *'I Need China': Duterte's Pivot to Beijing Shows Signs of Payoff*. Diambil dari bloomberg: https://www.bloomberg.com/-news/articles/2018-04-11/duterte-s-pivot-to-china-shows-some-signs-of-economic-payoff

Calvo, A. (2015, Oktober 26). *China, the Philippines, Vietnam, and International Arbitration in the South China Sea*. Diambil dari the Asia-Pacific Journal: https://apjjf.org/-Alex-Calvo/4391

Castro, R. C. D. (2018, Januari 25). *Beijing gone from foe to friend in Manila*. Diambil dari East Asia Forum: http://www.eastasiaforum.org/2018/01/25/-beijing-gone-from-foe-to-friend-in-manila/

Cheng, W. (2016, Oktober 21). *Duterte heads home from China with $24 billion deals*. Diambil kembali dari ABS-CBN News: https://news.abs-cbn.com/business/10/21/16/duterte-heads-home-from-china-with-24-billion-deals

China Embassy. (2010, Juni 25). *Foreign Ministry Spokesperson Qin Gang's Regular Press Conference on June 24, 2010*. Diambil dari China-Embassy: http://rw.china-embassy.org/eng/fyrth/t711740.htm

China Ministry of Foreign Affairs. (2010, Mei 24). *Regular Press Briefing by MOFA's Spokesperson on 24th June, 2010*. Diambil dari mofa.gov.vn: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns1006241857-00JVew0HA-fgRkg

Daiss, T. (2016, Juni 3). *South China Sea Disputes Off-Limits, Says NATO*. Diambil dari forbes: https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016-/06/03/south-china-sea-disputes-off-limits-says-general/#16147961ddaf

Darlene, E. (2017, April 7). *The Belt and Road Initiative and Philippine Participation in the Maritime Silk Road*. Diambil dari Republic of Phillipines: Foreign Service Institute: http://www.fsi.gov.ph/the-belt-and-road-initiative-and-philippine-participation-in-the-maritime-silk-road/

Diokno, B. E. (2017, Juni 1). *Financing the Philippine golden age of infrastructure*. Diambil dari Philippine: https://ppp.gov.ph-/in_the_news/financing-the-philippine-golden-age-of-infrastructure/

Diplomacy. (2018, Maret 3). *Philippines identifies sites in South China Sea for potential joint exploration with China*. Diambil dari South China Morning Post: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/-2135545/philippines-identifies-sites-south-china-sea-potential

Dzurek, D. J. (1996). *Maritime Briefing: The Spratly Islands Dispute: Who's On First?, Vol. 2, No. 1*. Durham: University of Durham.

Fook, L. L. (2018). The China-Philippine Bilateral Consultative Mechanism on the South China Sea: Prospects and Challenges . *ISEAS, No. 14*, 1-8.

Fravel, M. T. (2011). China's Strategy in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia, Vol. 33, No. 3,* 292-319.

Friend, B., Thayer, A., & John, M. (2018, Oktober 3). *The World According to China*. Diambil dari The Diplomat: https://thediplomat.com/2018/10/the-world-according-to-china/

Gau, M. S. (2015). The Sino-Philippine Arbitration on the South China Sea Disputes: Ineffectiveness of the Award, Inadmissibility of the Claims, and Lack of Jurisdiction, with Special Reference to the Legal Arguments Made by the Philippines in the Hearing on 7-13 July 2015. *China Oceans Law Review, Vol. 2015, No. 2*, 90-207.

GMA News. (2017, Mei 15). *China's Silk Road project to help solve Mindanao insurgency, criminality —officials*. Diambil dari GMA News Online: http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/610772/-china-s-silk-road-project-to-help-solve-mindanao-insurgency-criminality-officials/story/

Group of ASEAN-China China Joint Working. (2004). Terms of Reference of the ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. *Documents on ASEAN and the South China Sea*.

Haas, E. B. (1980). *Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes.* USA: Cambridge University Press.

_____. (1990). *When Knowledge is Power. Berkeley CA.* California: University of California Press.

_____. (2011). Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes. *World Politics, Vol 32, No. 3*, 357-405.

Holmes, J. (2018, Mei 30). *China Could Win a War Against America in the South China Sea*. Diambil dari The National Interest: https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/china-could-win-war-against-america-the-south-china-sea-26033?page=0%2C1

Holmes, O. (2016, Juli 12). *South China Sea Dispute:What You Need to Know About the Hague Court Ruling*. Diambil dari The Guardian: https://www.theguardian.com/news/2016/jul/12/south-china-sea-dispute-what-you-need-to-know-about-the-hague-court-ruling

Huth, C., Kelly, B., & Sell, L. S. V. (2017). Interdependence: A Concept Analysis. *International Journal Nurs Clin Pract, Vol. 4, No. 225*, 1-4.

IMF. (2018, November 12). *5 Report for Selected Countries and Subjects* . Diambil kembali dari International Monetary Fund: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=82&pr.y=16&sy=2014&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=924&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH&grp=0&a=#cs3

Storey, I. (2017). Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea. *ISEAS, No. 62*, 1-7.

Jiang, H. J. (2018, April 10). *Belt and Road--An Initiative for Win-win Cooperation*. Diambil dari fmprc.gov.cn: https://www.fmprc.gov.cn/-mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1549461.shtml

Jianhua, Z. (2018, November 15). *Working together to reinforce the three pillars for golden age of China-Philippines relations*. Diambil dari The Philippine Star: https://www.philstar.com/opinion/2018/11/15/1868747/working-together-reinforce-three-pillars-golden-age-china-philippines-relations

Jianmin, W. (2015, Maret 16). *"'One Belt and One Road,' Far-reaching Initiative," China-US Focus,*. Diambil dari China Daily: http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2015-04/20/content_20481447.htm.

Kaye, L. (2016, Juli 21). *Tension Heats Up Over the South China Sea, Shows No Signs of Cooling*. Diambil dari triplepundit: https://www.triplepundit.com-/2016/07/china-spratly-islands/

Kipgen, N. (2017, Maret 2). *The Philippines' South China Sea Flip-Flop*. Diambil dari the diplomat: https://thediplomat.com/2017/03/the-philippines-south-china-sea-flip-flop/

Kreuzer, P. (2018). *Dealing With China in The South China Sea*. Frankfurt: Peace Research Institute Frankfurt.

Kurlantzick, J. (2011, Oktober 7). *Growing U.S. Role in South China Sea*. Diambil dari Council on Foreign Relations: https://www.cfr.org/expert-brief/growing-us-role-south-china-sea

Lim, B. K. (2017, Mei 14). *China, Philippines to start South China Sea talks: ambassador*. Diambil dari Reuters.com: https://www.reuters.com/article-/us-china-silkroad-southchinasea-idUSKBN18A07P

Lo, C. (2005). *China's Policy Towards Territorial Disputes.* New York: Routledge.

Lohman, W. (2015). A Critical Assessment of ASEAN's Diplomacy Regarding the South China Sea. Dalam J. Huang, *Territorial Disputes in the South China Sea "Navigating Rough Waters"*. New York: Palgrave Macmillan.

Lopez, M. L. (2018, April 8). *Philippines has most to gain from China's 'Belt'*. Diambil dari Business World: https://www.bworldonline.com/philippines-has-most-to-gain-from-chinas-belt/

Maritime, A. (2017, Desember 4). *A Constructive Year for Chinese Base Building*. Diambil dari Asia Maritime Transparency Initiative: https://amti.csis.org/constructive-year-chinese-building/

Michael, H. F. (2016, Juni 13). *South China Sea ruling: America has a crucial role to play*. Diambil dari the Guardian: https://www.theguardian.com/-commentisfree/2016/jul/13/south-china-sea-ruling-challenges

Ministry of Foreign Affairs of China. (2014, June 24). *Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on June 24, 2014*. Diambil dari Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/-t1168353.shtml

Morton, K. (2006). China's ambition in the South China Sea: is a Legitimate Maritime Order Possible?. *International Affairs, Vol. 92, No. 4*, 900-940.

Hiebert, M., Nguyen, P., & Poling, G. B. (2015). *Building a More Robust U.S.-Philippines Alliance*. Washington DC: CSIS.

Myers, S. L. (2018, Mei 20). *Island or Rock? Taiwan Defends Its Claim in South China Sea*. Diambil dari The New York Times:

https://www.nytimes.com/2018/05/20/world/asia/china-taiwan-island-south-sea.html

Niquet, V. (2008, Mei 5). *China's Future Role in World Affairs: An Enigma?*. Diambil dari Cairn: https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2008-5-page-51.htm

Padilla, A. J. (2018, Februari 2). *Selling out PH sovereignty and patrimony for conditional Chinese money*. Diambil dari Radical's Nut: https://arnoldpadilla.com/tag/china/

Pazzibugan, D. Z. (2018, Januari 16). *PH, China to discuss joint oil, gas exploration in West PH Sea*. Diambil dari Global Nations: https://globalnation.inquirer.net/163437/ph-china-discuss-joint-oil-gas-exploration-west-ph-sea

Pemmaraju, S. R. (2016). *The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Assessment of the Award on Jurisdiction and Admissibility.* Oxford: Oxford University Press.

Penelope, M., & Shan, L. (2017). *Chinese Investment in Infrastructure Worldwide.* Perancis: The France Institutefor International and Strategic Affairs.

Pham, P. (2017, Desember 15). *What Is The United States Doing In The South China Sea?* Diambil dari Forbes: https://www.forbes.com/-sites/peterpham/2017/12/15/what-is-the-united-states-doing-in-the-south-china-sea/#7b44ef4a1a9e

Placido, D. (2017a, April 29). *Duterte expects 'more help' from China to develop PH*. Diambil dari news.abs-cbn: https://news.abs-cbn.com/news/-04/29/17/duterte-expects-more-help-from-china-to-develop-ph

_____. (2017b, November 15). *2 China-funded Pasig River bridges inch closer to construction*. Diambil dari ABS-CBN News: https://news.abs-cbn.com/news/11/15/17/2-china-funded-pasig-river-bridges-inch-closer-to-construction

Poling, G. B. & Cronin, C. (2018, Mei 17). *The Dangers of Allowing U.S.-Philippine Defense Cooperation to Languish*. Diambil dari War on The Rocks: https://warontherocks.com/2018/05/the-dangers-of-allowing-u-s-philippine-defense-cooperation-to-languish/

Rabena, A. J. (2017, Maret 21). *Philippines-China Relations: A Deepening Partnership*. Diambil dari appfi.ph: https://appfi.ph/publications/-commentaries/1311-philippines-china-relations-a-deepening-partnership

_____. (2018). The Complex Interdependence of China's Belt and Road Initiative in the Philippines. *Asia Pac Policy Stud, Vol. 5*, 683-697.

Ranada, P. (2016, Oktober 21). *Duterte bringing home $24B worth of deals from China*. Diambil dari Rappler: https://www.rappler.com/business/149886-duterte-business-deals-contracts-china-visit

_____. (2017, Februari 11). *Palace defends Duterte: He's 'more visionary', 'transformational'*. Diambil dari Rappler: https://www.rappler.com/-nation/161135-malacanang-duterte-leadership-style-response-ramos-comments

Rolland, N. (2015, Februari 12). *China's New Silk Road*. Diambil dari the National Bureau of Asian Research: http://www.nbr.org/-research/activity.aspx?id=531

Roza, R. (2013). *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan.* Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.

Seligman, L. (2018, Oktober 8). *U.S. Puts Money Where Its Mouth Is on China* . Diambil dari Foreign Policy: https://foreignpolicy.com/2018/10/08/u-s-puts-money-where-its-mouth-is-on-china/

Severino, R. C. (2010). ASEAN and the South China Sea. *Security Challenges, Vol. 6, No. 2*, 37-47.

Shepard, W. (2017, Juli 15). *The Real Role Of The AIIB In China's New Silk Road*. Diambil dari Forbes: https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/-2017/07/15/the-real-role-of-the-aiib-in-chinas-new-silk-road/#5a8a154d7472

Shicun, W. (2013). *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea.* Cambridge: Woodhead Publishing Limited.

Sohn, I. (2015). China's Monetary Ambitions: RMB Internationalization in Comparative Perspective. *The Korean Journal of International Studies, Vol. 13, No. 1*, 181-206.

Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta: Suaka Media.

Swaine, M. D. (2016). Chinese Views and Commentary on the "One Belt, One Road" Initiative. *China Leadership Monitor, No. 47*, 1-24.

Thao, N. H. (2009). The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea A Vietnamese perspective, 2002–2007. Dalam S. B. Emmers, *Security and International Politics in the South China Sea Towards a cooperative management regime*. Oxon: Routledge.

Thayer, C. A. (2011). The Tyranny of Geography: Vietnamese Strategies to Constrain China in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia, Vol. 33, No. 3*, 348-369.

_____. (2012). ASEAN'S Code of Conduct in the South China Sea: A Litmus Test for Community-Building?. *The Asian-Pacific Journal, Vol. 10, Issues 34, No. 4.*

_____. (2015). *Review of the Implementation of the 2002 ASEAN-China DOC and COC and Challenges.* Manila: Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC-SCS).

Thuy, T. T. (2011). *Recent Developments in the South China Sea: Implications for Regional Security and Cooperation.* Washington DC: Center for Strategic & International Studies.

Times, G. (2016, Juni 14). *Duterte could help heal breach with China*. Diambil dari En.People.Cn: http://en.people.cn/n3/2016/0614/c90780-9071869.html

Truong, T. (2011, Juli 15). *Recent Development In The South China Sea: From Declaration To Code Of Conduct*. Diambil dari South China Sea Studies: http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/second-

international-workshop/586-recent-development-in-the-south-china-sea-from-declaration-to-code-of-conduct-by-tran-truong-thuy

Sit, T., Wong, E., Lau, K. C., & Wen, T. (2017). One Belt, One Road China's Strategy for a New Global Financial Order. *Archive Monthly Review*, *Vol. 68, No. 8*, 36-45.

Valencia, M. J. (2018, Mei 6). *Compromise needed in the Philippines over its South China Sea policy*. Dipetik Desember 3, 2018, dari South China Morning Post: https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2144695/compromise-needed-philippines-over-its-south-china-sea

Warwick, M. K. (2018, Agustus 17). *Philippines Infrastructure: Lessons from China's Development*. Diambil dari The World Bank: http://www.worldbank.org/en/news/speech/2017/08/18/what-can-we-learn-from-china-decades-of-infrastructure-development

Wibowo, W. (2011). *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah.* Jakarta: Buku Kompas.

Xinhua. (2016, Agustus 18). *Xi calls for advancing Belt and Road Initiative*. Diambil dari xinhuanet.com: http://www.xinhuanet.com/english/2016-08/18/c_135608750.htm

_____. (2018, Oktober 16). *Chinese vessel to conduct scientific research in Philippines waters*. Diambil dari Xinhua.net: http://www.xinhuanet.com/-english/2018-01/16/c_136900175.htm

Yunling, Z. & Yuzhu, W. (2012). *ASEAN in China's Grand Strategy.* Beijing: Chinese Academy of Social Sciences.

Zhang, F. (2017). Chinese Thinking on the South China Sea and the Future of Regional Security. *Political Science Quarterly, Vol. 132, No. 3,* 435-466.